



**SKRIPSI**

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER  
DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DAN  
KELAUTAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

*THE AUTHORITY JEMBER LOCAL GOVERNMENT OF  
FISHERIES AND MARINE RESOURCES BASED LAW  
NUMBER 23 YEAR OF 2014 ON LOCAL GOVERNMENT*

**BAYU BUDHIRAHARJA**  
NIM : 080710101070

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER  
DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DAN  
KELAUTAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

*THE AUTHORITY JEMBER LOCAL GOVERNMENT OF  
FISHERIES AND MARINE RESOURCES BASED LAW  
NUMBER 23 YEAR OF 2014 ON LOCAL GOVERNMENT*

**BAYU BUDHIRAHARJA**  
**NIM : 080710101070**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTTO**

*“Bukan lautan hanya kolam susu, Kail dan jala cukup menghidupimu,  
Tiada badai tiada topan kau temui, Ikan dan udang menghampiri dirimu ...”\**

**(Koes Plus)**



---

\* Syair Lagu Koes Plus dicuplik dari lagu Kolam Susu

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER  
DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DAN  
KELAUTAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**BAYU BUDHIRAHARJA**

**NIM : 080710101070**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 27 JUNI 2015**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**

**ANTIKOWATI, S.H., M.H.**  
**NIP : 196112021988022001**

**Dosen Pembantu Anggota,**

**IWAN RACHMAD S., S.H., M.H**  
**NIP : 197004101998021001**

**PENGESAHAN**

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN  
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Oleh :

**BAYU BUDHIRAHARJA**

**NIM : 080710101070**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Pembantu Pembimbing Anggota,**

**ANTIKOWATI, S.H., M.H.**

**NIP : 196112021988022001**

**IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.**

**NIP : 197004101998021001**

Mengesahkan,  
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H**

**NIP : 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 03  
Bulan : Agustus  
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**ANTI KOWATI, S.H., M.H.**  
**NIP : 196112021988022001**

**IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.**  
**NIP : 197004101998021001**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **Dr. JAYUS, S.H., M.Hum.** : (.....)  
**NIP : 195612061983031003**

2. **ROSITA INDRAWATI, S.H., M.H.** : (.....)  
**NIP : 197805312005012001**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu Budhiraharja

NIM : 080710101070

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Agustus 2015

Yang menyatakan,



**BAYU BUDHIRAHARJA**

**NIM : 080710101070**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala hormat puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu Antikowati, S.H. M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi ; (Sementara kosong menunggu penetapan)
4. Sekretaris Panitia Penguji skripsi ; (Sementara kosong menunggu penetapan)
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I dan II Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2008, yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 27 Juni 2015

Penulis

## RINGKASAN

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 telah terjadi perubahan signifikan menyangkut pengangkatan hakim agung. Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, telah menyimpang atau tidak sesuai dengan norma Pasal 24 A ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena ketentuan tersebut telah mengubah kewenangan DPR dari hanya “memberikan persetujuan” menjadi kewenangan untuk “memilih” calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Demikian juga, ketentuan dalam kedua Undang-Undang *a quo*, yang mengharuskan Komisi Yudisial untuk mengajukan tiga calon hakim agung untuk setiap lowongan hakim agung, juga bertentangan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 24 A ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agar ketentuan kedua Undang-Undang *a quo*, tidak menyimpang dari norma Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut Mahkamah kata “dipilih” oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) harus dimaknai “disetujui” oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta kata “pemilihan” dalam ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung harus dimaknai sebagai “persetujuan”. Demikian juga frasa “3 (tiga) nama calon” yang termuat dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Komisi Yudisial harus dimaknai “1 (satu) nama calon”, sehingga calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial kepada DPR hanya satu calon hakim agung untuk setiap satu lowongan hakim agung untuk disetujui oleh DPR. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; pertama, Apa sajakah kewenangan DPR dalam proses pengangkatan hakim agung menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan kedua, Apa sajakah akibat hukum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 terhadap proses pengangkatan hakim agung.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Pasal 24A ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya menyatakan bahwa calon Hakim Agung diajukan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan

Perwakilan Rakyat dan selanjutnya ditetapkan menjadi Hakim Agung dengan Keputusan Presiden. Hak untuk menyetujui atau menolak inilah yang disebut sebagai hak konfirmasi yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik yang dipandang tidak boleh dibiarkan ditentukan sendiri secara sepihak oleh Presiden. Karena itu, fungsi pengawasan oleh DPR itu dilakukan tidak saja menyangkut pelaksanaan kebijakan klegislatif berupa (i) tindakan implementasi undang-undang dan (ii) penjabaran pengaturan undang-undang dalam peraturan pelaksanaan yang lebih operasional, tetapi juga (iii) dalam bentuk pengawasan terhadap pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik tertentu yang tidak boleh dibiarkan ditentukan sendiri secara sewenang-wenang oleh Presiden. *Kedua*, Mekanisme pengangkatan hakim agung menurut Pasal 24A ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan oleh Presiden setelah menerima calon hakim agung yang disetujui oleh DPR. Dalam hal ini, DPR dalam kapasitasnya sebagai representasi rakyat hanya memberikan persetujuan atas calon hakim agung yang diajukan oleh KY. Namun pengangkatan hakim agung yang demikian, telah diatur secara menyimpang dalam Undang Undang MA dan Undang Undang KY. Keterlibatan DPR dalam pengangkatan hakim agung dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hanya dalam bentuk memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diajukan oleh KY sebelum ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim agung, bukan dalam bentuk memilih calon.

Saran yang diberikan bahwa, Kedudukan dan peranan Mahkamah Agung sebagai pilar utama penegakkan hukum adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar dan Komisi Yudisial merupakan lembaga yang mengemban tugas sebagai wadah *check and balance* pelaksanaan penegakkan supremasi hukum juga merupakan hal yang harus dihormati. Kesemuanya bermuara pada tercapainya cita-cita emas Indonesia, dalam lingkup ketatanegaraan khususnya dibidang pembangunan hukum. Dengan demikian, kedudukan dan peranan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai pelaksana pengawasan kekuasaan kehakiman harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan berorientasi kepada kepentingan bangsa dan negara serta untuk menegakkan hukum dan mewujudkan supremasi hukum di Indonesia, khususnya dalam rangka pengawasan hakim untuk mewujudkan Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa.

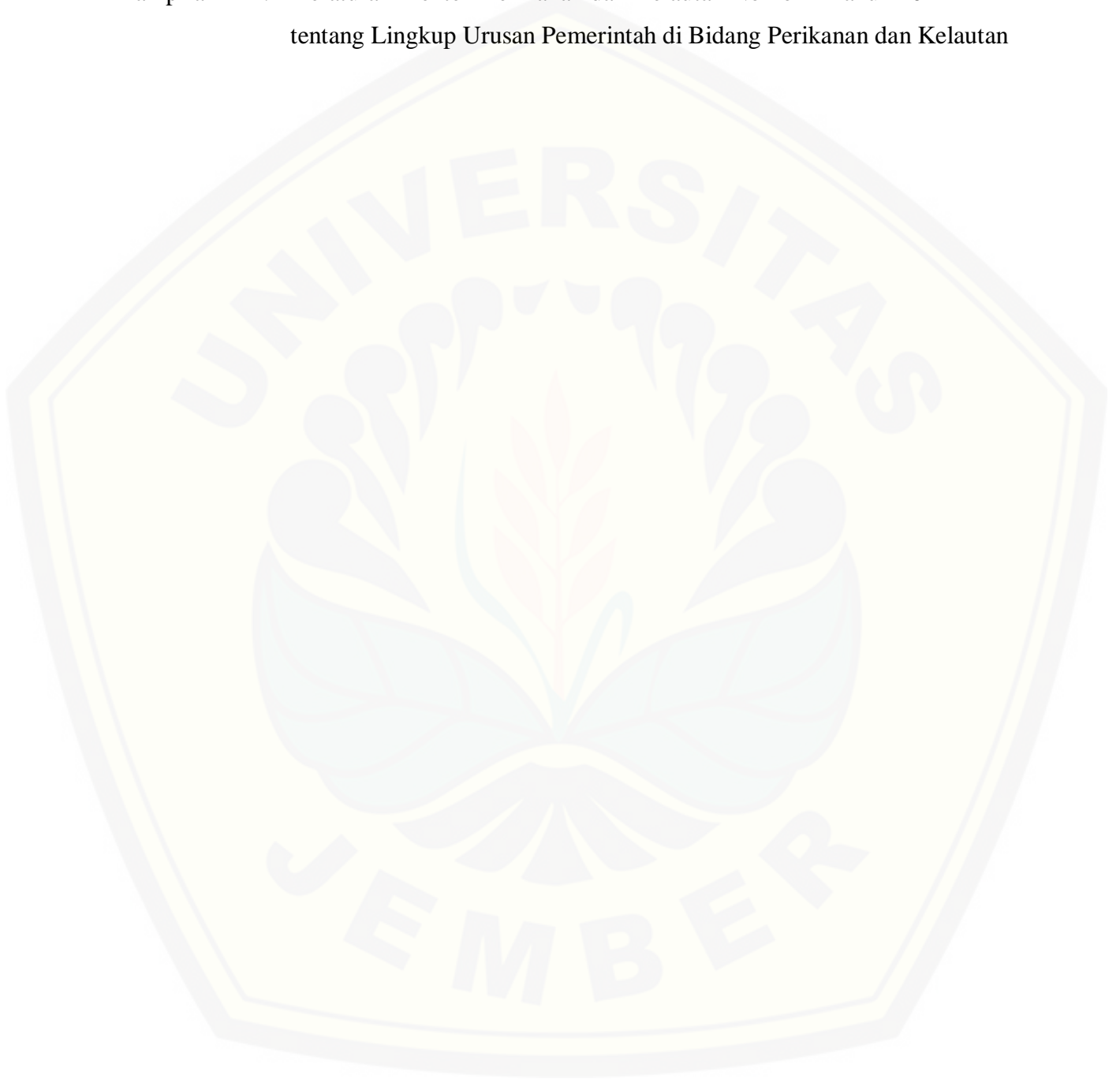
**DAFTAR ISI**

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Negara Hukum .....	11
2.1.1 Pengertian Negara Hukum .....	11
2.1.2 Unsur-Unsur Negara Hukum .....	18
2.2 Kekuasaan Kehakiman .....	20
2.2.1 Pengertian Kekuasaan Kehakiman .....	20

2.2.2	Asas Kekuasaan Kehakiman .....	24
2.3	Lembaga Perwakilan .....	27
2.3.1	Pengertian Lembaga Perwakilan .....	27
2.3.2	Fungsi Lembaga Perwakilan .....	30
2.4	Dewan Perwakilan Rakyat .....	31
2.4.1	Fungsi, Hak, Tugas dan Kewenangan DPR .....	31
2.4.2	Mekanisme Pengangkatan Hakim Agung .....	33
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>35</b>
3.1	Kewenangan DPR dalam proses pengangkatan hakim agung menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial .....	35
3.2	Akibat Hukum Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 Terhadap Proses Pengangkatan Hakim Agung .....	58
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>68</b>
4.1	Kesimpulan .....	68
4.2	Saran-saran .....	69
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 1 Tahun 2014  
tentang Lingkup Urusan Pemerintah di Bidang Perikanan dan Kelautan





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional ; Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang

Dengan demikian berdasarkan Konstitusi yakni Undang Undang Dasar Tahun 1945, negara mempunyai peran penting dalam rangka mengelola sumber daya alam yang ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Dalam melakukan pengelolaan hendaknya selalu didasarkan pada asas demokrasi ekonomi, asas efisiensi berkeadilan, asas berkelanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian untuk mewujudkan kesemuanya itu perlu diatur melalui undang-undang.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang berada di antara dua benua yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 sebagaimana negara yang merdeka dan berdaulat, wilayahnya tergolong luas mulai dari

Sabang sampai Merauke yang terdiri dari pulau-pulau besar sampai dengan pulau-pulau kecil. Negara Indonesia merupakan negara yang berkembang yakni dengan wilayahnya yang luas tersebut kita memiliki banyak kekayaan alam yang terdapat di daratan maupun di lautan. Hal tersebut merupakan anugerah dari Allah SWT yang patut disyukuri dan dimanfaatkan sebagai modal bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh kemakmurannya, perlu dijaga dengan baik untuk kelangsungan hidup hari ini dan di masa yang akan datang.

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, banyak warga negara Indonesia yang masih menggantungkan hidup dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara ini yang sangat melimpah, salah satunya dengan memanfaatkan kekayaan laut. Laut merupakan ladang yang masih dapat menampung pekerjaan yang masih berkaitan dengan laut. Tidak hanya warga di daerah pesisir pantai saja yang menggantungkan hidup mereka pada sumber daya laut, namun juga banyak masyarakat yang jauh dari pesisir pantai mengadu nasib mereka dengan cara melaut. Laut merupakan salah satu kekayaan negara Indonesia yang mempunyai potensi sumber daya alam yang berlimpah.<sup>1)</sup>

Sumber daya alam (*natural resources*) pada dasarnya mempunyai pengertian sebagai segala sesuatu yang berada di bawah dan di atas bumi, termasuk tanah itu sendiri. Dengan kata lain, sumber daya alam adalah sesuatu yang masih terdapat di dalam maupun di luar bumi yang sifatnya masih potensial dan belum dilibatkan dalam proses produksi. Pengertian tersebut berbeda dengan sumber daya, karena merupakan sumber daya alam yang sudah diambil dari dalam atau atas bumi dan siap dipergunakan atau dikombinasikan dengan faktor produksi lainnya untuk menghasilkan produk baru yang dapat dimanfaatkan baik oleh konsumen maupun produsen.

Sumber daya alam mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara (khususnya negara berkembang), dimana semakin tinggi pertumbuhan ekonominya, akan mengakibatkan persediaan sumber daya alam yang tersedia akan semakin

---

<sup>1)</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Jakarta : Rineka Cipta. 2011. hlm. 1

berkurang. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan selalu menuntut adanya barang sumber daya dalam jumlah banyak pula, dan sumber daya tersebut diambil dari persediaan sumber daya alam yang sudah ada. Dengan demikian, terdapat hubungan yang positif antara jumlah barang sumber daya dengan pertumbuhan ekonomi, disamping juga hubungan yang negatif antara persediaan sumber daya alam dengan pertumbuhan ekonomi.

Uraian tersebut di atas, memberikan peringatan kepada kita bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, apabila dilakukan tidak secara berhati-hati akan menguras persediaan sumber daya alam yang ada. Kondisi ini pada gilirannya nanti akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan harus dilakukan secara bijaksana, dengan selalu mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya.

Sebagaimana disebutkan oleh Aan Eko Widarto :

Potensi sumber daya laut Indonesia menempati peringkat dua sebagai negara mega-biodiversity. Terdapat 42 ekosistem daratan alami dan 5 ekosistem laut dengan panjang garis pantai mencapai 81.000 km, total perairan darat 0,55 juta km<sup>2</sup> dan laut 5,8 juta km<sup>2</sup>. Perikanan laut sebesar 6,7 sampai 7,7 juta metrik ton sedangkan perikanan darat sebesar 3,6 juta metrik ton yang dari keseluruhan jumlah tersebut baru dapat dimanfaatkan sebesar 30%. Potensi terumbu karang yang ada mengandung lebih dari 70 genus sehingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai keragaman koral paling tinggi di dunia. Potensi sumber daya pesisir dan laut yang sedemikian besar itu ternyata masih belum mampu dikelola dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kelemahan kebijakan dan peraturan dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk di dalamnya pesisir dan laut.<sup>2)</sup>

Ikan adalah salah satu sumber daya alam yang bersifat dapat pulih dan dapat memperbaharui diri. Disamping sifat memperbaharui diri tersebut, sumber daya ikan pada umumnya mempunyai sifat *open access* dan *common property* yang artinya pemanfaatannya bersifat terbuka oleh siapa saja dan kepemilikannya bersifat umum. Sifat sumber daya seperti ini tentunya akan

---

<sup>2)</sup> Aan Eko Widarto, *Penguatan Hak Nelayan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut*, Universitas Brawijaya, Malang, 2008, hlm.36

menimbulkan beberapa konsekwensi.<sup>3)</sup> Dengan sifat-sifat sumberdaya seperti di atas, menjadikan sumber daya ikan bersifat unik, dan setiap orang mempunyai hak untuk memanfaatkan sumberdaya tersebut dalam batas-batas kewenangan hukum suatu negara. Pada hakikatnya, masalah sumber daya milik bersama, berkaitan erat dengan persoalan-persoalan pendayagunaan atau pemanfaatan yang berlebihan.

Pemanfaatan sumberdaya perikanan pada dasarnya dapat dilaksanakan oleh warga negara Republik Indonesia perorangan maupun dalam bentuk badan hukum dan dapat dinikmati secara merata oleh produsen dan konsumen. Walaupun sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan oleh semua orang, namun dalam pemanfaatannya harus senantiasa menjaga kelestariannya. Ini berarti, dalam pemanfaatannya harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga diharapkan akan dapat memberikan manfaat secara teratur, terus menerus, dan lestari. Jadi, pemanfaatan sumber daya perikanan harus dilakukan secara rasional, salah satunya dengan pengendalian usaha perikanan.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan sumber daya bersama seperti halnya sumber daya ikan adalah memungkinkan bagi setiap orang atau perusahaan dapat dengan bebas masuk untuk mengambil manfaatnya. Dengan demikian, secara prinsip, sumber daya milik bersama yang dicirikan dengan pengambilan secara bebas maupun akibat-akibat lainnya yang ditimbulkan seperti biaya eksternalitas (disekonomis) dan lain sebagainya, akan menimbulkan kecenderungan pengelolaan secara deplesi. Pengertian deplesi tersebut di atas, adalah cara pengambilan sumberdaya alam secara besar-besaran, yang biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan mentah. Dalam kaitannya dengan sumber daya perikanan yang sifatnya dapat diperbaharui, tindakan deplesi walaupun dapat diimbangi dengan kegiatan konservasi akan tetap melekat dampaknya terhadap lingkungan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkannya.

Salah satu hal yang patut mendapatkan perhatian dari pemanfaatan sumber daya perikanan adalah keberadaan nelayan kecil yang mencari ikan

---

<sup>3)</sup> Media Informasi Perikanan, *Himpunan Makalah Utama : Pengembangan Industri Perikanan Laut di Indonesia*, 2001, Yogyakarta, hlm.25

secara tradisional. Kondisi nelayan kecil tradisional di tengah berkembang pesatnya teknologi dan persaingan usaha semakin menempatkan mereka pada posisi marginal. Belum lagi faktor internal berupa konflik antar kelompok nelayan yang terjadi baik karena perselisihan daerah tangkap, penggunaan alat tangkap, maupun penentuan jenis tangkapan. Secara hukum posisi mereka jelas memerlukan perlindungan dan penguatan, sehingga kebijakan-kebijakan dan kerangka hukum harus jelas-jelas mengakomodasi kepentingan nelayan kecil dan tradisional tersebut.

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ada campur tangan kewenangan pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah provinsi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 27 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa :

- 1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
- 2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a) Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
  - b) Pengaturan administratif;
  - c) Pengaturan tata ruang;
  - d) Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
  - e) Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
- 3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- 4) Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua Daerah provinsi tersebut.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas masalah peranan dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan secara lebih mendalam dalam skripsi dengan judul : ***Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.***

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Apakah kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 ?
2. Apakah hambatan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh secara teoritis yang di dapatkan dalam perkuliahan, serta mengembangkan dan membuat analisa secara yuridis praktis.
3. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater pada khususnya.

### 1.3.1 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan.

## 1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian.

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan yang diperoleh, sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut ini metode yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>4)</sup>

#### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>4)</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi <sup>5)</sup>

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum <sup>6)</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 4) Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lingkup Urusan Pemerintah di Bidang Perikanan dan Kelautan.

---

<sup>5)</sup> Ibid, hlm.93

<sup>6)</sup> Ibid, hlm. 137



#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>7)</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

---

<sup>7)</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.165

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>8)</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

---

<sup>8)</sup> Op.Cit, Peter Mahmud Marzuki, hlm.171

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Pemerintah Daerah

##### 2.1.1 Definisi Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah dikembangkan berdasarkan azas otonomi (desentralisasi) dan tugas pembantuan. Azas dekonsentrasi hanya diterapkan di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang belum siap atau belum sepenuhnya melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Dasar. Karena itu, hubungan yang diidealkan antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi, dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah hubungan yang tidak bersifat hirarkis. Namun demikian, fungsi koordinasi dalam rangka pembinaan otonomi daerah dan penyelesaian permasalahan antar daerah, tetap dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagaimana mestinya.

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan yang pergerakannya bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.<sup>9)</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; kata pemerintahan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintahan daerah jelas dibedakan artinya satu sama lain. Dirumuskan bahwa pemerintah adalah pemerintah pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang Undang Dasar

---

<sup>9)</sup> Jimly Assiddiqie.2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Konstitusi Press. hlm.278

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan kata pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sementara itu, kata pemerintahan daerah dikaitkan dengan pengertian penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, kata pemerintahan dalam arti penyelenggaraan pemerintahan dibedakan dari kata pemerintah yang merupakan subjek penyelenggaranya. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota beserta perangkat daerah. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, gubernur, bupati, dan walikota tepatnya masing-masing disebut sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pembedaan kedua istilah pemerintah dan pemerintahan itu juga tergambar pada judul Bab III, "kekuasaan pemerintahan negara" dan Bab VI "Pemerintah Daerah". Demikian pula dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (5) dan ayat (6) perumusannya dimulai dengan "pemerintahan daerah" sebagai subjek kalimat.<sup>10)</sup>

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>10)</sup> Jimly Assididqie, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm.411

Daerah (DPRD) merupakan badan legislatif daerah, sedangkan pemerintah daerah merupakan badan eksekutif daerah. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemisahan dua unsur pemerintahan daerah tersebut di atas, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah, dengan maksud untuk menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai komponen penting dan sentral dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pemikiran demikian merupakan salah satu usaha untuk memberikan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat daerah, yang tercermin dengan adanya keikutsertaan rakyat lewat lembaga perwakilan di daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menentukan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang bersangkutan.

Penyelenggara pemerintahan adalah presiden dibantu satu orang wakil presiden serta menteri-menteri dalam kabinet pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah ; untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, yang masing-masing untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil walikota..

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas, maka pengertian dari Pemerintahan Daerah pada dasarnya sama yaitu suatu proses kegiatan antara pihak yang berwenang memberikan perintah dalam hal ini pemerintah dengan yang menerima dan melaksanakan perintah tersebut dalam hal ini masyarakat. Pemerintah daerah memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan umum dari pusat, yang meliputi wewenang mengambil setiap tindakan untuk kepentingan rakyat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Urusan pemerintahan umum yang dimaksud sebagian berangsur-angsur diserahkan kepada pemerintah

daerah sebagai urusan rumah tangga daerahnya, kecuali yang bersifat nasional untuk menyangkut kepentingan umum yang lebih luas.

### **2.1.2 Kewenangan Pemerintah Daerah**

Pembicaraan mengenai otonomi daerah tidak dapat lepas dari hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam konteks bentuk negara kesatuan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang undang. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan hak dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah propinsi merupakan urusan dalam skala propinsi yang meliputi :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia;
7. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah

- termasuk lintas kabupaten/kota;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
  11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
  12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
  13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
  14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/ kota;
  15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
  16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan propinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota merupakan urusan dalam skala kabupaten/kota, antara lain meliputi :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan;
7. Penanggulangan masalah sosial;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertanahan;
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;

16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Pemerintah Daerah mempunyai beberapa tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b) Mengajukan rancangan peraturan daerah;
- c) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan wewenang tersebut, kepala daerah juga mempunyai kewajiban sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 27 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang isi selengkapnya yaitu :

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban :
  - a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;



- c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - d) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - f) Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - g) Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
  - h) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
  - i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
  - j) Menjalinkan hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
  - k) Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.
- 2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
  - 3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - 4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - 5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Sementara itu, wakil kepala daerah mempunyai beberapa tugas :

- a) Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b) Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
- d) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
- e) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
- f) Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
- g) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah (gubernur, bupati atau Walikota) melalui Sekretaris Daerah, serta bertugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi (khusus untuk Dinas Daerah Propinsi).

Dalam menyelenggarakan tugasnya, dinas daerah berfungsi : merumuskan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ; pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pemberian pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Untuk Dinas Daerah Propinsi sebanyak-banyaknya terdiri atas 10 (sepuluh dinas) sedangkan Dinas Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya 14 (empat belas) dinas. Untuk melaksanakan kewenangan propinsi di daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis

Daerah Propinsi (UPTD2P) yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa daerah Kabupaten /Kota. Pada Dinas Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

Lembaga teknis daerah propinsi/kota merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) melalui Sekretaris Daerah. Lembaga ini melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretaris Daerah dan Dinas Daerah, meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi, kependudukan dan pelayanan kesehatan. Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit daerah, baik untuk wilayah propinsi, maupun kabupaten/kota.

### 2.1.3 Teori Kewenangan dan Bentuk-Bentuknya

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan “wewenang” hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan.<sup>11)</sup> Dalam tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (Undang Undang

---

<sup>11)</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Pers, Cetakan ke-10, 2008, hlm.130

Dasar) atau peraturan perundang-undangan.<sup>12)</sup> Kewenangan tersebut terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Contoh : kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yaitu :

- a) Delegasi
- b) Mandat

Diantara jenis-jenis pelimpahan wewenang ini, perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut :

- a) Delegasi adalah pelimpahan tanggung-jawab dan wewenang kepada anak buah atau rekan kerja.<sup>13)</sup> Delegasi memiliki dua unsur penting yaitu Tanggung-jawab adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan Wewenang sebagai kekuasaan untuk menunaikan kewajibannya. seseorang yang menyerahkan tugas dan kewenangannya kepada seseorang lain dalam batas kepemimpinannya, yang dipercayainya mampu merampungkan atau menjaga tugas dan kewenangannya itu, secara hukum dan moral harus ikut bertanggung-jawab atas segala kejadian yang dilakukan oleh orang (dan pembantu-pembantunya) yang menerima delegasi itu, betapa kecil pun akibat kejadian tersebut terhadap organisasi. Karena itu setiap unsur pimpinan berkewajiban melakukan pengawasan pada bawahan langsungnya, dan bertanggung-jawab atas semua yang terjadi dalam kepemimpinannya. Misalnya pimpinan terendah dalam organisasi adalah bawahan dari pimpinan di atasnya, berurutan sampai ke pimpinan tertinggi, dan diberikan kepercayaan oleh atasan langsungnya. Dengan demikian, walaupun kesalahan atau kekeliruan atau pelanggaran terjadi dan dilakukan dalam batas tugas dan tanggung-jawab pimpinan yang terendah dalam organisasi, setiap pimpinan yang terlibat dalam pendelegasian tugas itu, secara hukum dan

---

<sup>12)</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, eds. kesatu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.90

<sup>13)</sup> Ibid hlm.90

moral harus bertanggung-jawab. Harus dicamkan, bahwa pendelegasian berlaku dari atas sampai ke bawah, dan karena itu semua yang terlibat dalam pendelegasian itu secara hukum dan moral harus bertanggung-jawab

- b) Mandat adalah perintah atau arahan yang diberikan oleh orang banyak (rakyat, perkumpulan, dan sebagainya) kepada seseorang (beberapa orang) untuk dilaksanakan sesuai dengan kehendak orang banyak itu.<sup>14)</sup> Sehingga contohnya ketika kepala daerah memerintahkan bawahannya mengeluarkan uang daerah untuk suatu kepentingan, maka konsekuensi tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat (kepala daerah).

Baik wewenang yang diperoleh berdasarkan atribusi maupun berdasarkan pelimpahan sama-sama harus terlebih dahulu dipastikan bahwa yang melimpahkan benar memiliki wewenang tersebut dan wewenang itu benar ada berdasarkan konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan. Demikian pula wewenang dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dibedakan antara atribusi dan delegasi. Atribusi terdapat apabila adanya wewenang yang diberikan oleh Undang Undang Dasar atau Undang Undang kepada suatu badan dengan kekuasaan dan tanggung jawab sendiri (mandiri) untuk membuat atau membentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan delegasi terdapat apabila suatu badan (organ) yang mempunyai wewenang secara mandiri membuat peraturan perundang-undangan (bentuk wewenang atribusi) menyerahkan kepada suatu badan atas kekuasaan dan tanggung jawab sendiri wewenang untuk membuat atau membentuk peraturan perundang-undangan.

Pembicaraan mengenai otonomi daerah tidak dapat lepas dari hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam konteks bentuk negara kesatuan. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan : Negara

---

<sup>14)</sup> Ibid, hlm.90

Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, Kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang Undang. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan hak dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

#### **2.1.4 Otonomi Daerah**

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam salah satu isi penjelasan Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 itu dikatakan bahwa : “Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek dan locate rechtsgemeenschappen*) atau daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.”

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembicaraan mengenai otonomi daerah tidak dapat lepas dari hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam konteks bentuk negara kesatuan. Sedangkan prinsip otonomi daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam penjelasan umumnya adalah : Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>15)</sup> Selanjutnya dalam Pasal 21 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan ; bahwasanya dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak :

- a) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b) Memilih pimpinan daerah;
- c) Mengelola aparatur daerah;
- d) Mengelola kekayaan daerah;
- e) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- h) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan.

Selain hak, daerah mempunyai kewajiban yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014. Terdapat 15 (lima belas) kewajiban yang dipunyai oleh daerah, yaitu :

- a) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan

---

<sup>15)</sup> Ali Faried. 2005. *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*. Jakarta. Bumi Aksara. hlm.27

- nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
  - c) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
  - d) Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
  - e) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
  - f) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - g) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
  - h) Mengembangkan sistem jaminan sosial;
  - i) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
  - j) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
  - k) Melestarikan lingkungan hidup;
  - l) Mengelola administrasi kependudukan;
  - m) Melestarikan nilai sosial budaya;
  - n) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
  - o) Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan. Menurut Syauckani dan Afan Gafar : <sup>16)</sup>

Otonomi daerah bukanlah merupakan hak dari masyarakat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah merupakan kewajiban daerah dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Jadi pada hakikatnya otonomi daerah itu lebih merupakan kewajiban dari pada hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

---

<sup>16)</sup> Syauckani dan Afan Gafar. 2007. *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta. PT. Bhuana Ilmu Populer. hlm.36



Terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, Siswanto Sunarno menyebutkan bahwa :

Ide otonomi daerah bermula dari akibat kesalahan di masa lalu, baik secara struktural maupun kultural, yang imbasnya sampai juga pada persoalan fundamental kenegaraan kita, misalnya muncul fenomena baru untuk memisahkan diri, meraih otonomi seluas-luasnya, atau memilih merdeka. Berbagai tuntutan dan harapan tersebut, entah yang bersifat alami ataupun bermuatan politis, luas ataupun terbatas, dilatari oleh berbagai persoalan yang amat kompleks. Muncul sejumlah protes dan pertanyaan kritis berkisar pada masalah ketidakadilan sosial, dominasi pusat, ketimpangan pembangunan, kesenjangan perekonomian antar daerah, pembagian penerimaan negara dan daerah yang tidak berimbang, juga masalah marginalisasi potensi dan putra daerah.<sup>17)</sup>

Secara prinsipil terdapat 2 (dua) hal yang tercakup dalam otonomi, yaitu hak dan wewenang untuk manajemen daerah dan tanggung jawab untuk kegagalan dalam manajemen daerah. Pada hakikatnya sebelum suatu daerah menyelenggarakan otonomi daerah, aspek terpenting dari hal tersebut adalah menyangkut adanya pelimpahan wewenang yang dikenal dengan peristilahan desentralisasi. Dengan kata lain desentralisasi merupakan pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pihak lainnya untuk dilaksanakan. Desentralisasi secara prinsipal di Indonesia dalam bentuk desentralisasi perundangan (*regeling*) dan pemerintahan (*Bestuur*). Desentralisasi tersebut diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, desentralisasi dari sudut asal usul bahasa berasal dari bahasa latin, yaitu “*De*” atau lepas dan “*Centrum*” atau pusat. Menurut perkataannya desentralisasi itu berarti melepaskan dari pusat.<sup>18)</sup> Hal ini mencerminkan adanya kewenangan dari bagian atau bawahannya untuk melaksanakan sesuatu yang diserahkan dari pusat, dengan tetap adanya hubungan antara pusat dengan bagiannya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menganut sistem desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

---

<sup>17)</sup> Siswanto Sunarno. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 9

<sup>18)</sup> Eggy Sudjana. 2005. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (edisi revisi)*. Jakarta. Rinneka Cipta. hlm.18

Pengertian lebih lanjut mengenai pengertian desentralisasi disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa : Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan mengenai pengertian dekonsentrasi disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan : Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pengertian dari tugas pembantuan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan : tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, hubungan desentralisasi dan otonomi sangat erat kaitannya. Pada dasarnya otonomi adalah tujuan dari desentralisasi daerah-daerah otonom, yakni daerah yang mandiri, tingkat kemandirian diturunkan dari tingkat desentralisasi yang diselenggarakan semakin tinggi derajat desentralisasi, semakin tinggi otonomi daerah. Dalam konteks negara kesatuan, otonomi daerah seharusnya diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, proses pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bukan berarti menjadikan daerah lepas dari pengaturan dan pembinaan pemerintah pusat.

## **2.2 Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**

### **2.2.1 Pengertian Perikanan dan Kelautan**

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan

lingkungannya mulai dari praproduksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dijelaskan bahwa nelayan adalah orang yang mempunyai mata pencaharian dengan melakukan penangkapan ikan. Lebih lanjut dalam pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan Laut Lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi. Kehadiran Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern.

Di sisi lain, terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

### 2.2.2 Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki sumberdaya pesisir dan laut yang berlimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bahkan eksploitasi sumberdaya tersebut selama ini telah memperdalam kesenjangan antara golongan pelaku usaha, khususnya antara perikanan rakyat dan moderen. Dalam kaitan dengan ketersediannya, Dahuri, dan M.J Sitepu menyebutkan bahwa :

Potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut ini secara garis besar dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu sumberdaya dapat pulih (*renewable resources*), sumberdaya tak dapat pulih (*non-renewable resources*), dan jasa-jasa lingkungan (*enviromental services*). Ketiga potensi inilah walaupun telah dimanfaatkan, tetapi masih belum optimal dan terkesan tidak terencana dan terprogram dengan baik.<sup>19)</sup>

---

<sup>19)</sup> Rohmin Dahuri dan M.J. Sitepu, *Hukum Perikanan dan Kelautan*, Yayasan Obor, Jakarta, 2005, hlm.54

Pemerintah Indonesia Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah membawa implikasi baru bagi pembangunan di wilayah pesisir. Bila sebelumnya seluruh wilayah perairan laut Indonesia berada pada wewenang pemerintah pusat, maka dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang atas sebagian wilayah perairan laut.

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintah Daerah minimal memiliki dua implikasi terhadap kegiatan sumberdaya pesisir dan laut, khususnya dalam hal perwilayahan daerah penangkapan ikan, yaitu : (1) Daerah propinsi harus dengan lebih pasti mengetahui potensi perikanan serta batas-batas wilayahnya sebagai dasar untuk menentukan jenis dan tipe kegiatan perikanan yang sesuai di daerahnya, (2) Daerah propinsi harus mampu mengalokasikan 4 mil laut dari 12 mil laut yang berada di bawah wewengangnya kepada kota/kabupaten yang selanjutnya dikelola pemanfaatannya.

Pembangunan sumberdaya pesisir dan laut pada saat ini menjadi andalan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan pemulihan ekonomi akibat krisis yang berlangsung sejak tiga tahun lalu. Sesuai dengan kebijakan politik untuk memacu desentralisasi, maka pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut akan lebih banyak didelegasikan kepada pemerintah daerah. Hal ini tentu saja memberikan peluang yang lebih besar bagi daerah untuk mengelola dan memanfaatkan potensi pesisir dan kelautannya bagi kesejahteraan daerah. Namun disisi lain juga menciptakan kemungkinan eksploitasi sumberdaya hanya untuk memacu pertumbuhan daerah. Ditambah lagi dengan kondisi umum sumberdaya manusia, ekosistem, dan kebijakan pembangunan pesisir dan laut selama ini menjadi tantangan tersendiri bagi semua pihak untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya tersebut yang lestari dan memihak pada kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Djoko Tribawono menyebutkan bahwa Wilayah pesisir yang merupakan sumber daya potensial di Indonesia adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Sumber daya ini sangat besar yang didukung oleh adanya garis pantai sepanjang sekitar 81.000 km. Garis pantai yang panjang ini menyimpan

potensi kekayaan sumber alam yang besar. Potensi itu diantaranya potensi hayati dan non hayati. Potensi hayati misalnya: perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang, sedangkan potensi nonhayati misalnya: mineral dan bahan tambang serta pariwisata. Di daerah ini juga berdiam para nelayan yang sebagian besar masih prasejahtera. Keadaan pantai di Indonesia sangat bervariasi, yaitu mulai dari pantai pasir putih-berbatu, landai-terjal, bervegetasi-berlumpur, teduh, bergelombang yang semua ini sangat cocok dengan berbagai peruntukannya, seperti perikanan pantai, budidaya perikanan, industri perhotelan, turisme, dan lain-lain.<sup>20)</sup>

Secara umum batasan antara daratan dan lautan di peta tidaklah merupakan suatu garis yang jelas, akan tetapi muncul secara gradual melalui suatu daerah yang bersifat transisional. Biasanya nama yang diberikan untuk daerah transisi ini adalah *wilayah pesisir* atau *daerah pesisir*. Bagi perencana dan pengelola wilayah pesisir, mendefinisikan batasan tentang wilayah atau daerah pesisir merupakan suatu yang lebih dari sekedar masalah akademis. Pemerintah sering membuat sistem administrasi, atau membuat kebijakan-kebijakan yang berlaku di dalam wilayah pesisir tersebut guna memberikan arahan bagi pengambil keputusan. Secara umum ada dua batasan yang dipakai dalam mendefinisikan wilayah pesisir yaitu definisi berdasarkan pendekatan ilmiah dan definisi yang berorientasikan kebijakan. Pesisir adalah daerah di mana darat dan lautan bertemu, jika garis pertemuan ini tidak bergerak maka akan mudah untuk mendefinisikan pesisir akan tetapi kenyataannya proses-proses alamiah yang membentuk wilayah ini sangat dinamis dan berubah sesuai waktu akibat proses-proses alam tersebut.

Singkatnya menurut pendekatan ilmiah wilayah pesisir itu didefinisikan sebagai: bagian darat yang kering dan lautan yang berdekatan (air dan tanah yang terbenam) di mana proses-proses daratan dan tataguna lahan secara langsung mempengaruhi proses-proses di laut dan penggunaannya dan sebaliknya. Selanjutnya menurut pendekatan administrasi wilayah (daerah) pesisir dapat mencakup daerah yang relatif kecil menyangkut hubungan antara darat dan laut yang bisa berupa daerah seluas beberapa ratus meter sampai

---

<sup>20)</sup> Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2002, hlm.9

beberapa kilometer atau mulai dari daerah batas darat terus mencapai batas laut ke daerah lepas pantai menurut yurisdiksi nasional.

Menurut kesepakatan internasional terakhir, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara lautan dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua. Pengakuan terhadap nilai-nilai sosial, ekonomi, lingkungan dan sumberdaya dari suatu wilayah pesisir mulai banyak diterima, akan tetapi hal ini tidak selamanya demikian, pengakuan ini secara alamiah juga tidak merata diseluruh negara dan masyarakat. Bentuk pendekatan yang tipikal dalam pengeksploitasian sumberdaya wilayah pesisir umumnya merendahkan sumberdaya wilayah pesisir dan potensi penggunaannya yang berganda. Nilai pasar yang diberikan terhadap wilayah pesisir jauh dari nilai yang sebenarnya, sehingga harga yang dibayarkan bagi akses, atau penggunaannya, atau degradasi aset wilayah pesisir tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya.

Wilayah pesisir adalah suatu wilayah yang unik seperti adanya pasang surut, hutan mangrove, terumbu karang, pantai, gelombang pasang dan pulau penghalang, semuanya ini hanya terdapat di daerah pesisir. Lingkungan pesisir adalah batas pertemuan antara darat dan laut, dan daerah ini meliputi wilayah sekitar 8% permukaan bumi, merupakan daerah yang sangat beragam dan produktif teristimewa pada perairan dangkal di wilayah daerah tropis. Lingkungan pesisir ini telah lama menjadi perhatian bagi umat manusia. Mereka menyediakan kebutuhan dasar manusia (seperti makanan, perumahan dll) dan juga berbagai fungsi (contohnya: perdagangan, infrastruktur), estetika (contohnya: lingkungan bersenang-senang) dan yang bersifat strategis (pilihan daerah teritorial dan pertahanan).

Dengan meningkatnya jumlah penduduk bumi yang terus bertambah dari waktu ke waktu dan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia maka pembangunan perlu dilakukan. Pembangunan tersebut adalah mutlak, akan tetapi bila dilakukan dengan tidak terencana akan menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap manusia itu sendiri. Berbagai contoh menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak terencana dapat menimbulkan bahaya terhadap baik

manusia dan sumberdaya alam yang dimanfaatkan lewat pembangunan tersebut. Pengrusakan hutan mangrove, penurunan hasil tangkapan ikan atau udang serta sumberdaya perikanan lainnya, kerusakan terumbu karang adalah sebahagian dari contoh-contoh kerusakan pada wilayah pesisir (ekosistem dan sumberdayanya).

Pada umumnya, kerusakan terumbu karang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan perikanan yang bersifat desktruktif, yaitu penggunaan bahan-bahan peledak, bahan beracun (*cyanida*), dan juga aktivitas penambangan karang untuk bahan bangunan, reklamasi pantai, kegiatan pariwisata yang kurang bertanggung jawab, dan sedimentasi akibat meningkatnya erosi dan lahan atas. Dalam melakukan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir harus dibuat penentuan laju optimal yang menguntungkan dan ramah lingkungan.

Terkait dengan pengelolaan perikanan tersebut, keberadaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan faktor pendorong pemberdayaan masyarakat, tumbuh dan berkembangnya prakarsa serta kreativitas masyarakat, sehingga akan meningkatkan peran aktif dalam berbangsa dan bernegara. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih menempatkan kewenangan otonomi secara utuh di tingkat daerah Kabupaten dan daerah kota. Kewenangan yang diberikan kepada daerah didasarkan atas azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintah di banyak negara, terutama negara berkembang mempunyai otoritas penuh dalam mengelola sumber daya perikanan. Oleh karena otoritasnya berada di tangan pemerintah, semua tahapan dan komponen pengelolaan sumber daya perikanan mulai dari pengumpulan informasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi dilakukan pemerintah. Pengelolaan oleh Pemerintah ini dilaksanakan lembaga atau instansi pemerintah yang ada di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan otonomi yang lebih jelas dan nyata termasuk kewenangan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Kewenangan tersebut meliputi:



- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas 12 mil laut.
- b. Pengaturan kepentingan administratif.
- c. Pengaturan tata ruang.
- d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat.
- e. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara khususnya di laut.

Kewenangan-kewenangan daerah atas wilayah laut tersebut akan membantu penyelesaian permasalahan di laut yang membutuhkan tindakan cepat dan strategis. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya menyangkut pengamanan laut dari jarahan nelayan-nelayan asing yang melakukan pencurian dengan cara pengeboman dan peracunan ikan, pengambilan biota dilindungi, serta masalah kerusakan ekosistem lainnya.

Selain kewenangan tersebut, daerah juga dapat membentuk dan atau mengembangkan lembaga teknis atau dinas untuk menangani kewenangan-kewenangan di bidang eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumberdaya laut, administrasi, penataan ruang, penegakan hukum, serta bantuan keamanan dan kedaulatan negara.

Wilayah pesisir yang merupakan sumber daya potensial di Indonesia adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Sumber daya ini sangat besar yang didukung oleh adanya garis pantai sepanjang sekitar 81.000 km. Garis pantai yang panjang ini menyimpan potensi kekayaan sumber alam yang besar. Potensi itu diantaranya potensi hayati dan non hayati. Potensi hayati misalnya: perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang, sedangkan potensi nonhayati misalnya: mineral dan bahan tambang serta pariwisata. Di daerah ini juga berdiam para nelayan yang sebagian besar masih prasejahtera. Keadaan pantai di Indonesia sangat bervariasi, yaitu mulai dari pantai pasir putih-berbatu, landai-terjal, bervegetasi-berlumpur, teduh, bergelombang yang semua ini sangat cocok dengan berbagai peruntukannya, seperti perikanan pantai, budidaya perikanan, industri perhotelan, turisme, dan lain-lain.

Kebijakan bidang perikanan dan lautan sebagai kebijakan strategis diharapkan dapat membawa kemakmuran rakyat, mengembangkan harkat dan

martabat bangsa Indonesia serta mampu mensejajarkan diri dengan komunitas negara maju didunia. Kebijakan tersebut didasarkan pada obyektivitas ilmiah (*scientific objectivity*) yang dibangun berdasarkan asas partisipatif dan diarahkan agar rakyat sebagai penerima manfaat terbesar.

Teknologi perikanan terus berkembang dengan pesat sejalan dengan meingkatnya ilmu dan teknologi. Di bidang penangkapan ikan, misalny, dikenal peralatan elektronik sebagai alat bantu penangkapan ikan yang produktif. Pengelolaan sumber daya ikan tidak hanya memikirkan tingkat produktivitas yang tinggi, tetapi diperlukan juga adanya langkah-langkah pengendalian pemanfaatannya. Walaupun sumber daya ikan dapat pulih sendiri, tetapi tetap harus dilekati dengan keterbatasan, sehingga pemanfaatannya harus rasional. Artinya, pemanfaatan sumber daya ikan harus mengarah pada tercapainya pemanfaatan seoptimal mungkin tanpa membahayakan kelestarian. Sebagaimana disebutkan bahwa sumber daya ikan dapat pulih sendiri sesuai dengan sifat-sifat biologis dan adanya dukungan lingkungan yang memadai. Namun demikian, adanya penangkapan ikan yang tidak terkendali, pencemaran perairan, perusakan lingkungan dan lain sebagainya dapat mengakibatkan kelestariannya terganggu. Hal tersebut akan menjadi lebih parah manakala berjalan berkelanjutan sehingga dapat mengakibatkan sumber daya ikan mengalami kepunahan, sehingga pada gilirannya usaha perikanan menjadi terganggu.

Efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan ditunjang oleh perkembangan. Ganggguan terhadap kelestarian sumber daya ikan tidak hanya disebabkan tekanan pemanfaatan yang berlebihan, namun juga disebabkan penggunaan alat tangkap hasil temuan kemajuan teknologi yang sebenarnya dilarang untuk digunakan. Untuk mencegah daan memberantas perlu dilakukan pengawasan yang cukup memadai. Pembangunan maritim Indonesia mempunyai aspek yang sangat luas dan bervariasi, sehingga tanpa didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang memadai, maka pembangunana yang dimaksud hanya akan menyentuh masalah secara parsial, tidak menyeluruh. Perencanaan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan potensi laut membutuhkan data dan informasi yang akurat. Namun data dan informasi laut

yang tersedia, belum cukup untuk menunjang perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya laut.

Pengendalian upaya penangkapan adalah salah satu pendekatan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkaitan dengan pembatasan kapasitas penangkapan atau jumlah alat tangkap ikan. Tujuannya, meningkatkan hasil ikan yang ditangkap serta meningkatkan kinerja ekonomi industri perikanan melalui pengurangan upaya atau kapasitas penangkapan ikan yang berlebihan. Upaya pengendalian penangkapan adalah dengan menentukan jumlah unit penangkapan ikan yang boleh dioperasikan melalui sistem perijinan. Secara umum ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pemanfaatan tidak sah atas sumber daya ikan di wilayah perairan Indonesia. Pertama, adanya kekosongan armada penangkapan di beberapa kawasan Indonesia, misalnya Di Laut Arafuru, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi dan Laut Pasifik. Kedua, karena *law enforcement* yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan ketiga karena tidak lancarnya investasi akibat krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan sehingga menimbulkan iklim ketidakpastian dalam usaha. Akibatnya, hanya sedikit kapal-kapal yang beroperasi, serta kondisi perairan Indonesia yang luas sehingga sulit dideteksi

### **2.2.3 Potensi Sumber Daya Perikanan Dan Kelautan**

Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki sumber daya ikan yang sangat tinggi. Dengan adanya Zona ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) dalam lingkup hukum laut internasional yang baru, maka sumber daya ikan milik bangsa Indonesia menjadi bertambah besar jumlahnya dan sangat potensial untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.<sup>12)</sup> Sumber daya ikan seperti di atas, dipadukan dengan nelayan dan petani ikan yang sangat besar jumlahnya, merupakan modal dasar pembangunan nasional yang sangat penting artinya. Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara, bidang perikanan harus mampu ikut mewujudkan kekuatan ekonomi sebagai upaya meningkatkan ketahanan nasional. Dalam ketentuan Pasal 33 undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa : Bumi, air, dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya ikan. Ketentuan tersebut secara tegas mengingatkan agar pelaksanaan penguasaan negara atas sumber daya ikan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak dan oleh karenanya pemanfaatan sumber daya ikan harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan, sekaligus memperbaiki kehidupan nelayan dan petani ikan kecil serta memajukan desa-desa pantai. Berdasarkan hal tersebut perlu pemanfaatan sumber daya ikan dan laut yang berdaya guna. Potensi pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir dan laut secara umum dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: sumberdaya dapat pulih, sumberdaya tak dapat pulih, dan jasa-jasa lingkungan.

1. Sumberdaya Dapat Pulih (*Renewable Resources*)

Potensi sumberdaya dapat pulih terdiri dari sumberdaya perikanan tangkap, budidaya pantai (tambak), budidaya laut, dan bioteknologi kelautan. Perairan Indonesia memiliki potensi lestari ikan laut sebesar 6,2 juta ton.<sup>21)</sup> Dari potensi tersebut sampai pada tahun 1998 baru dimanfaatkan sekitar 58,8 %. Dengan demikian masih terdapat 41 % potensi yang belum dimanfaatkan atau sekitar 2,6 juta ton per tahun. Sementara itu, potensi pengembangan budidaya laut untuk berbagai jenis ikan (kerapu, kakap, beronang, dan lain-lain), kerang-kerangan, dan rumput laut, yaitu masing-masing 3,1 juta ha, 971.000 ha, dan 26.700 ha. Sedangkan potensi produksi budidaya ikan dan kerang serta rumput laut adalah 46.00 ton per tahun, dan 482.400 ton per tahun. Dari keseluruhan potensi produksi budidaya laut tersebut, sampai saat ini hanya sekitar 35 persen yang sudah direalisasikan

2. Sumberdaya Tak Dapat Pulih

Selain sumberdaya kelautan dapat pulih seperti diuraikan di atas, potensi kelautan lainnya yang dapat dikembangkan secara optimal adalah

---

<sup>21)</sup> Bengen, D.G., *Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem dan Sumber daya Pesisir (Prosiding Pelatihan Untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu)*, Bogor, 2000, Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan IPB), hal.36

sumberdaya tidak dapat pulih. Menurut Deputi Bidang Pengembangan Kekayaan Alam, BPPT dari 60 cekungan minyak yang terkandung dalam alam Indonesia, sekitar 70 persen atau 40 cekungan terdapat di laut. Dari 40 cekungan itu 10 cekungan telah diteliti secara intensif, 11 cekungan baru diteliti sebagian, sedangkan 29 cekungan belum terjamah. Diperkirakan ke-40 cekungan itu berpotensi menghasilkan 106,2 milyar barel setara minyak, namun baru 16,7 milyar barel yang diketahui dengan pasti, 7,5 milyar barel diantaranya sudah dieksploitasi. Sedangkan sisanya sebesar 89,5 milyar barel berupa kekayaan yang belum terjamah. Cadangan minyak yang belum terjamah itu diperkirakan 57,3 milyar barel terkandung di lepas pantai, yang lebih dari separuhnya atau sekitar 32,8 milyar barel terdapat di laut dalam.

### 3. Jasa-Jasa Lingkungan

Pemanfaatan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan juga dapat dilakukan terhadap jasa-jasa lingkungan, terutama untuk pengembangan pariwisata, pelayaran, dan energi kelautan. Dewasa ini pariwisata berbasis kelautan (wisata bahari) telah menjadi salah satu produk pariwisata yang menarik. Pembangunan kepariwisataan bahari pada hakekatnya adalah upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata bahari yang terdapat di seluruh pesisir dan lautan Indonesia, yang terwujud dalam bentuk kekayaan alam yang indah (pantai), keragaman fauna dan flora seperti terumbu karang dan berbagai jenis ikan hias yang diperkirakan sekitar 263 jenis. Potensi jasa lingkungan kelautan yang masih memerlukan sentuhan pendayagunaan secara profesional adalah jasa transportasi laut (perhubungan laut). Sebagai negara bahari ternyata pangsa pasar angkutan laut baik antar pulau maupun antar negara masih dikuasai oleh armada niaga berbendara asing. Menurut Catatan Dewan Kelautan Nasional, kemampuan daya angkut armada niaga nasional untuk muatan dalam negeri baru mencapai 54,4 persen, sedang ekspor baru mencapai 4 persen, sisanya masih dikuasai oleh armada niaga asing

Pada dasarnya sumber daya perikanan merupakan sumber daya yang dapat pulih kembali atau *renewable resources*, namun demikian tetap ada batas-

batasnya. Apabila sumber daya ikan dimanfaatkan tanpa batas atau tidak rasional serta melebihi batas optimal, dapat mengakibatkan kerusakan atau terancamnya kelestarian. Pemanfaatan berlebihan yang mempunyai dampak kurang menguntungkan terhadap pelestarian sumber daya ikan, perlu dicegah dengan suatu peraturan yang baik, sehingga usaha perikanan akan berjalan dengan berkelanjutan, karena masih dalam ambang batas potensi lestari yang aman. Berdasarkan hal tersebut perlu kiranya pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan dilaksanakan dengan terkendali, memperhatikan dan menjamin kelangsungan usaha, serta senantiasa menjaga kelestarian sumber daya ikan yang ada





## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kesesuaian Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Sebagaimana telah disebutkan bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang berada di antara dua benua yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 sebagaimana negara yang merdeka dan berdaulat, wilayahnya tergolong luas mulai dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari pulau-pulau besar sampai dengan pulau-pulau kecil. Negara Indonesia merupakan negara yang berkembang yakni dengan wilayahnya yang luas tersebut kita memiliki banyak kekayaan alam yang terdapat di daratan maupun di lautan. Hal tersebut merupakan anugerah dari Allah SWT yang patut disyukuri dan dimanfaatkan sebagai modal bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh kemakmurannya, perlu dijaga dengan baik untuk kelangsungan hidup hari ini dan di masa yang akan datang.

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, banyak warga negara Indonesia yang masih menggantungkan hidup dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara ini yang sangat melimpah, salah satunya dengan memanfaatkan kekayaan laut. Laut merupakan ladang yang masih dapat menampung pekerjaan yang masih berkaitan dengan laut. Tidak hanya warga di daerah pesisir pantai saja yang menggantungkan hidup mereka pada sumber daya laut, namun juga banyak masyarakat yang jauh dari pesisir pantai mengadu nasib mereka dengan cara melaut. Laut merupakan salah satu kekayaan negara Indonesia yang mempunyai potensi sumber daya alam yang berlimpah.

Pemanfaatan sumberdaya perikanan pada dasarnya dapat dilaksanakan oleh warga negara Republik Indonesia perorangan maupun dalam bentuk badan hukum dan dapat dinikmati secara merata oleh produsen dan konsumen.



Walaupun sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan oleh semua orang, namun dalam pemanfaatannya harus senantiasa menjaga kelestariannya. Ini berarti, dalam pemanfaatannya harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga diharapkan akan dapat memberikan manfaat secara teratur, terus menerus, dan lestari. Jadi, pemanfaatan sumber daya perikanan harus dilakukan secara rasional, salah satunya dengan pengendalian usaha perikanan.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan sumber daya bersama seperti halnya sumber daya ikan adalah memungkinkan bagi setiap orang atau perusahaan dapat dengan bebas masuk untuk mengambil manfaatnya. Dengan demikian, secara prinsip, sumber daya milik bersama yang dicirikan dengan pengambilan secara bebas maupun akibat-akibat lainnya yang ditimbulkan seperti biaya eksternalitas (disekonomis) dan lain sebagainya, akan menimbulkan kecenderungan pengelolaan secara deplesi. Pengertian deplesi tersebut di atas, adalah cara pengambilan sumberdaya alam secara besar-besaran, yang biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan mentah. Dalam kaitannya dengan sumber daya perikanan yang sifatnya dapat diperbaharui, tindakan deplesi walaupun dapat diimbangi dengan kegiatan konservasi akan tetap melekat dampaknya terhadap lingkungan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkannya.

Salah satu hal yang patut mendapatkan perhatian dari pemanfaatan sumber daya perikanan adalah keberadaan nelayan kecil yang mencari ikan secara tradisional. Kondisi nelayan kecil tradisional di tengah berkembang pesatnya teknologi dan persaingan usaha semakin menempatkan mereka pada posisi marginal. Belum lagi faktor internal berupa konflik antar kelompok nelayan yang terjadi baik karena perselisihan daerah tangkap, penggunaan alat tangkap, maupun penentuan jenis tangkapan. Secara hukum posisi mereka jelas memerlukan perlindungan dan penguatan, sehingga kebijakan-kebijakan dan kerangka hukum harus jelas-jelas mengakomodasi kepentingan nelayan kecil dan tradisional tersebut.

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ada campur tangan kewenangan pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah propinsi

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 27 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa :

- 1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
- 2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a) Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
  - b) Pengaturan administratif;
  - c) Pengaturan tata ruang;
  - d) Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
  - e) Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
- 3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- 4) Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua Daerah provinsi tersebut.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Perikanan sebagaimana telah disebutkan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi-daya ikan kecil dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan. Mengingat usaha perikanan yang sifatnya demikian kompleks, maka upaya

pengaturan secara keseluruhan akan memberikan dampak yang positif bagi usaha perikanan itu sendiri. Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, berikut ini penulis sajikan data hasil penelitian dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember :

Secara geografis Kabupaten Jember terletak pada posisi  $6^{\circ}27'29''$  s/d  $7^{\circ}14'35''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}59'6''$  s/d  $8^{\circ}33'56''$  Lintang Selatan berbentuk dataran ngarai yang subur pada bagian Tengah dan Selatan, dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas. Utara dan Timur serta Samudra Indonesia sepanjang batas Selatan. Letaknya yang strategis karena berada dipersimpangan antara Surabaya dan Bali, sehingga perkembangannya cukup pesat dan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Jawa Timur. Sebagai Daerah Otonom, Kabupaten Jember memiliki batas-batas teritorial, luas wilayah, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial politik dan sosial budaya serta sumber daya manusia. Kondisi obyektif yang demikian dapat mengungkapkan berbagai karakteristik sumberdaya alam, komoditas yang dihasilkan, mata pencaharian penduduk, keadaan serta ekonomi dan sosial budayanya yang mencerminkan kekuatan sebagai suatu kompetensi daerah, sekaligus beragam permasalahan yang dihadapinya.

Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah  $3.293,34 \text{ km}^2$  dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Berdasarkan letak Kabupaten Jember dalam peta dan batas-batas wilayahnya, maka selain memiliki potensi wilayah darat Kabupaten Jember khususnya wilayah Jember selatan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia maka Jember juga kaya akan potensi kelautan. Wilayah potensi laut tersebut selain dimanfaatkan sebagai potensi pariwisata dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga kaya akan potensi sumber daya perikanan.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Lebih lanjut disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan azas manfaat, kebersamaan, keadilan, kemandirian, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian serta pembangunan yang berkelanjutan. Dalam ketentuan Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan :

- a) Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil
- b) Meningkatkan penerimaan dan devisa Negara
- c) Mendorong perluasan dan kesempatan kerja
- d) Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan
- e) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan
- f) Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing
- g) Meningkatkan ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan
- h) Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal
- i) Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

Dengan adanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi baru bagi pembangunan wilayah laut

dan pengelolaan sumber daya perikanan. Bila sebelumnya seluruh wilayah perairan laut Indonesia berada pada wewenang pemerintah pusat, maka dengan Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah memiliki wewenang atas sebagian wilayah perairan laut. Pelaksanaan Pasal 27 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut minimal memiliki dua implikasi terhadap kegiatan sumberdaya laut, khususnya dalam hal perwilayahan daerah penangkapan ikan, yaitu : (1) Daerah propinsi harus dengan lebih pasti mengetahui potensi perikanan serta batas-batas wilayahnya sebagai dasar untuk menentukan jenis dan tipe kegiatan perikanan yang sesuai di daerahnya, (2) Daerah propinsi harus mampu mengalokasikan 4 mil laut dari 12 mil laut yang berada di bawah wewenangnya kepada kota/kabupaten yang selanjutnya dikelola pemanfaatannya.

Konsep otonomi daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebetulnya bukan desentralisasi secara total. Dua konsep lain yang juga dilaksanakan bersamaan dengan desentralisasi tersebut yakni dekonsetrasi dan tugas pembantuan. Oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 7). Sedangkan dekonsetrasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (Pasal 1 angka 8).

Pemerintah Daerah dalam Pasal 18 ayat (1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di wilayah laut, dalam Pasal 18 artinya daerah melalui pemerintah daerah diberikan hak mengelola sumber daya alam untuk kepentingan dan kesejahteraan daerah, hal ini juga berkaitan dengan azas desentralisasi yang menghendaki adanya pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah yang bersangkutan, untuk secara bertingkat dengan alat perlengkapan sendiri mengurus kepentingan rumah tangga sendiri atas inisiatif dan beban biaya sendiri sejauh tidak menyimpang dari kebijaksanaan pemerintah pusat.

Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Dekonsentrasi Dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi Atau Pemerintah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa :

- 1) Pelimpahan sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan dari Kementerian kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan penugasan sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan dari Kementerian kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
- 2) Pelimpahan sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan dari Kementerian kepada Gubernur dan penugasan sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan dari Kementerian kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan kelautan dan perikanan sesuai Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian, dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara prinsip memberikan dasar-dasar sangat berbeda bagi kewenangan kabupaten atau kota terkait tata kelola sumberdaya alam, termasuk sumberdaya perikanan. Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2014 yang dilimpahkan kepada Gubernur dan ditugaskan kepada pemerintah daerah, terdiri atas program yang meliputi : (a) pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap; (b) peningkatan produksi perikanan budidaya; (c) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; (d) pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; (e) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; (f) pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan; (g) pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan (h) peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Kementerian.

Terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut

diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

Pembangunan sumberdaya pesisir dan laut pada saat ini menjadi andalan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan pemulihan ekonomi akibat krisis yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Sesuai dengan kebijakan politik untuk memacu desentralisasi, maka pengelolaan sumberdaya laut dan pengelolaan perikanan lebih banyak didelegasikan kepada pemerintah daerah. Hal ini tentu saja memberikan peluang yang lebih besar bagi daerah untuk mengelola dan memanfaatkan potensi pesisir dan kelautannya bagi kesejahteraan daerah. Namun disisi lain juga menciptakan kemungkinan eksploitasi sumberdaya hanya untuk memacu pertumbuhan daerah. Ditambah lagi dengan kondisi umum sumberdaya manusia, ekosistem, dan kebijakan pembangunan pesisir dan laut selama ini menjadi tantangan tersendiri bagi semua pihak untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya tersebut yang lestari dan memihak pada kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan meliputi :

- 1) Perairan Indonesia ;
- 2) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ; dan
- 3) Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Selanjutnya untuk pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, diselenggarakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan, persyaratan, dan atau standart internasional yang diterima secara umum. Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia adalah pengelolaan perikanan di laut lepas. Pelaksanaan otonomi daerah dalam hal ini desentralisasi pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan akan memberikan implikasi dan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang berbeda “lebih baik atau lebih buruk” dibandingkan dengan praktek-praktek pengelolaan sumberdaya dimasa lalu. Terhadap sumberdaya pesisir laut, implikasi dan konsekuensi tersebut diantaranya adalah :

1) Kelembagaan

Dalam era desentralisasi, setiap daerah harus membenahi struktur dan peran serta integrasi fungsi kelembagaan yang ada. Khusus untuk sumberdaya laut dan perikanan, hal ini menjadi sangat penting mengingat seluruh daerah propinsi dan sebagian besar daerah kabupaten memiliki wilayah laut yang luas. Tanpa pendekatan kebijakan dan kelembagaan yang punya kewenangan yang jelas dan terpadu, maka masalah pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan dimasa lalu akan terulang kembali di daerah

2) Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia adalah merupakan bagian terpenting dalam pembangunan, sehingga peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan mutlak diprioritaskan oleh setiap daerah yang menjadikan laut dan perikanan sebagai tumpuan pertumbuhan daerah.

3) Praktek Pengelolaan

Sepanjang tiga dekade yang lalu, telah menjadikan beban yang berat bagi sumberdaya perikanan dan laut di Indonesia. Seperti halnya hutan, sumberdaya ini telah mengalami kerusakan yang sangat parah akibat beban eksploitasi komersial yang hanya bertujuan untuk mengejar keuntungan jangka pendek semata. Hal ini jelas menghancurkan dan merusak sistem tradisional pengelolaan berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat dan menjadikan masyarakat nelayan sebagai golongan paling miskin diantara kelompok masyarakat miskin lainnya di Indonesia. Dalam era desentralisasi ini, praktek-praktek pengelolaan tersebut di atas harus diatur sedemikian



rupa sehingga tujuan ekonomi tidak akan mengorbankan aspek kelestarian lingkungan. Pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pemain utama di daerahnya harus saling mendukung dan mengontrol pelaksanaan pembangunan kawasan laut di wilayahnya.

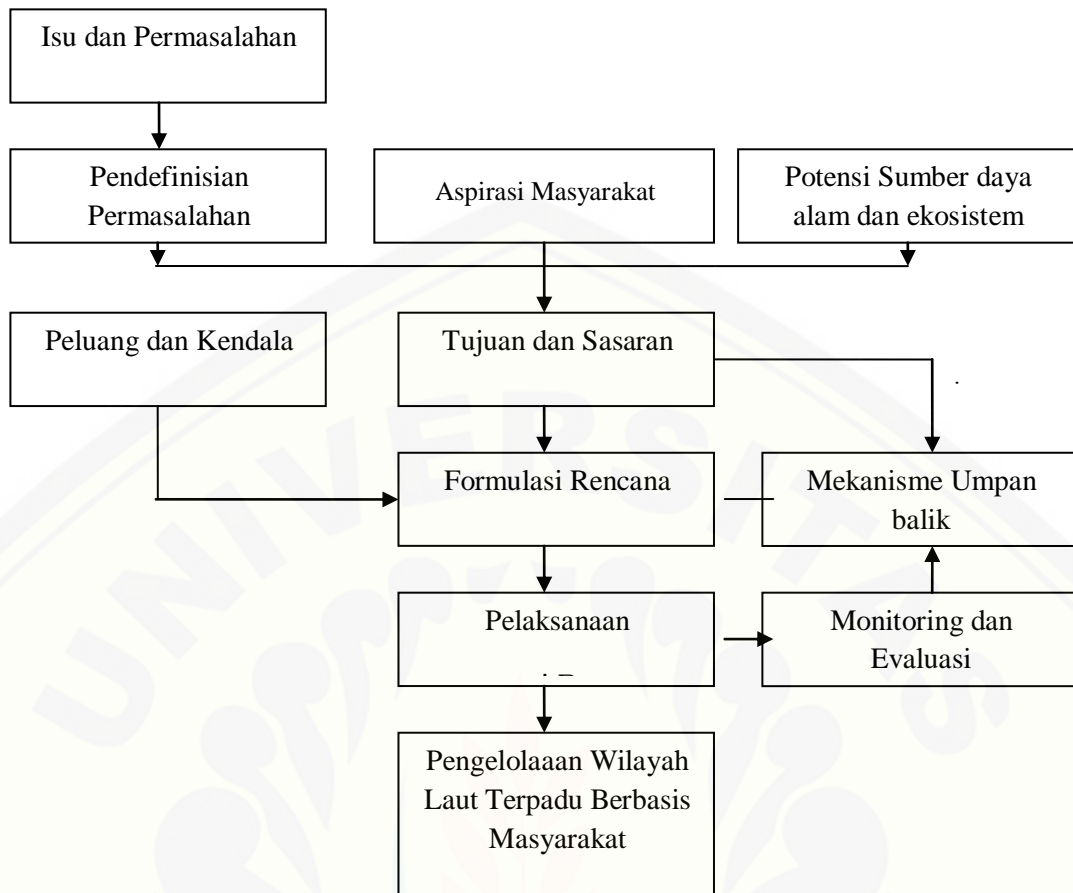
#### 4) Partisipasi Masyarakat

Pendekatan pembangunan selama ini yang bersifat pasif dan seragam tidak membawa dampak positif terhadap masyarakat, karena umumnya disain pembangunan dibuat berdasarkan aspirasi kelompok dominan, dalam kekuasaan, modal, dan akses terhadap birokrasi. Sebagai satu kesatuan sosial, masyarakat khususnya masyarakat adat tidak diuntungkan. Masyarakat khususnya masyarakat adat yang berada di kawasan pesisir dan laut, seringkali tidak terwakili aspirasinya dalam proses pembangunan. Padahal mereka harus diberi keleluasaan untuk melindungi dirinya dan budayanya serta menolak perubahan yang berdampak negatif bagi penghidupannya. Konsep-konsep penentuan nasib sendiri ini telah luas diterima dalam prinsip-prinsip internasional, namun di Indonesia pelaksanaannya masih relatif sangat jauh.

Keempat hal tersebut sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyebutkan :

- 1) Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.
- 2) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan terpadu yang berbasis masyarakat diperlukan beberapa proses pengelolaan yang sesuai dengan tahapan manajemen yaitu mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Tahapan proses perencanaan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat tetap mengacu kepada proses perencanaan pembangunan berkelanjutan wilayah lautan. Berikut ini bagan manajemen pengelolaan perikanan tersebut :



Dinas Perikanan Kabupaten Jember (Diklat Perikanan 2014)

Selanjutnya Pengelolaan Kelautan dan Perikanan tentang definisi bagan tersebut di atas sebagai bentuk manajemen pengelolaan perikanan :

#### 1) Tahap Perencanaan

Tahap awal dari proses perencanaan adalah dengan cara mengidentifikasi dan mendefinisikan isu dan permasalahan yang ada, yang menyangkut kerusakan sumber daya alam, konflik penggunaan, pencemaran, dimana perlu dilihat penyebab dan sumber permasalahan tersebut. Selanjutnya juga perlu diperhatikan sumber daya alam dan ekosistem yang ada yang menyangkut potensi, daya dukung, status, tingkat pemanfaatan, kondisi sosial ekonomi dan budaya setempat seperti jumlah dan kepadatan penduduk, keragaman suku, jenis mata pencaharian masyarakat lokal, sarana dan prasarana ekonomi dan lain-lain. Berdasarkan pendefinisian masalah yang dipadukan dengan informasi tentang sumber daya alam dan ekosistem

serta aspirasi masyarakat selanjutnya disusun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta melihat peluang dan kendala yang ada selanjutnya mulai dibuat perencanaan berupa kegiatan pembangunan dalam bentuk program dan proyek. Perencanaan yang telah disusun perlu disosialisasikan kembali kepada masyarakat luas untuk mendapat persetujuan, setelah mendapat persetujuan rencana ini baru dimasukkan dalam agenda pembangunan baik daerah maupun nasional. Dalam penyusunan rencana pengelolaan ini, perlu juga diperhatikan bahwa konsep pengelolaan sumber daya pesisir terpadu berbasis masyarakat diharapkan akan mampu untuk (1) meningkatkan kesadaran masyarakat, akan pentingnya SDA dalam menunjang kehidupan mereka (2) meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga mampu berperan serta dalam setiap tahapan pengelolaan dan (3) meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan bentuk-bentuk pemanfaatan yang lestari dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

## 2) Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Rencana

Pada tahap implementasi perencanaan, diperlukan kesiapan dari semua pihak yang terlibat di dalamnya, seperti masyarakat itu sendiri, tenaga pendamping lapangan dan pihak lainnya. Selain itu juga diperlukan koordinasi dan keterpaduan antar sektor dan *stakeholder* yang ada sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dan ego sektoral. Dalam hal ini diperlukan adanya lembaga pelaksana yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan seperti Pemerintah Daerah, masyarakat lokal, Investor/swasta, instansi sektoral, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pada tahap implementasi ini juga diperlukan kesamaan persepsi antara masyarakat lokal dengan lembaga atau orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini sehingga masyarakat benar-benar memahami rencana yang akan dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan pada tahap implementasi ini adalah: (1) integrasi ke dalam masyarakat, dengan melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk menjawab seluruh pertanyaan yang berhubungan dengan penerapan konsep dan mengidentifikasi pemimpin potensial yang terdapat di lembaga

masyarakat lokal. (2) pendidikan dan pelatihan masyarakat, metode pendidikan dapat dilakukan secara non formal menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan cara tatap muka sehingga dapat diperoleh informasi dua arah dan pengetahuan masyarakat lokal dapat dikumpulkan untuk dimasukkan dalam konsep penerapan (3) memfasilitasi arah kebijakan, dalam hal ini segenap kebijakan yang berasal dari masyarakat dan telah disetujui oleh koordinator pelaksana hendaknya dapat didukung oleh pemerintah daerah, sehingga kebijakan bersama tersebut mempunyai kekuatan hukum yang jelas, dan (4) penegakan hukum dan peraturan, yang dimaksudkan agar seluruh pihak yang terlibat akan dapat menyesuaikan tindakannya dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

### 3) Tahap Monitoring dan evaluasi

Monitoring yang dilakukan sejak dimulainya proses implementasi perencanaan dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas kegiatan, permasalahan yang timbul dalam implementasi kegiatan. Monitoring dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak yang ada. Setelah monitoring selanjutnya dilakukan evaluasi bersama secara terpadu dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Melalui evaluasi ini akan diketahui kelemahan dan kelebihan dari perencanaan yang ada guna perbaikan untuk pelaksanaan tahap berikutnya. Pengelolaan wilayah kelautan dan perikanan terpadu berbasis masyarakat sesuai dengan prinsip ko-manajemen perikanan yaitu pembagian atau pendistribusian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya perikanan. Oleh sebab itu keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat dapat mengacu kepada indikator keberhasilan ko-manajemen perikanan.

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut. Munculnya paradigma untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional,

tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan : Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Untuk itu perlu pelaksanaan konsep *blue economy* dalam pemanfaat dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan berbagai inovasi yang berorientasi pada pelestarian sumber daya untuk memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Pengembangan *blue economy* tersebut diharapkan dapat menciptakan daya saing yang lebih tinggi melalui inovasi dan efisiensi yang berkelanjutan, melakukan pembangunan tanpa merusak lingkungan, menciptakan berbagai industri baru di bidang kelautan dan perikanan, serta menciptakan lapangan kerja. Upaya pengembangan *blue economy* perlu pula diiringi upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan dan perikanan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta disertai upaya untuk mengelola wilayah laut nasional secara terintegrasi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk :

1. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil
2. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara
3. Mendorong perluasan kesempatan kerja
4. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan
5. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing
6. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan
7. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan dan
8. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah :

1. Melindungi, mengoservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan
2. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
3. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan, dan,
4. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil

Dalam kaitannya dengan pengelolaan perikanan dalam ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, disebutkan bahwa :

- 1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
- 2) Nahkoda atau pemimpin kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
- 3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan dan atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan

kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- 4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan dan atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan RI
- 5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan untuk penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan hanya untuk penelitian.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 9 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan disebutkan bahwa : Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia :

- a) Alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan ;
- b) Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standart yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu, dan atau
- c) Alat penangkapan ikan yang dilarang

Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal tersebut dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan kita sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam, serta kenyataan terdapatnya penggunaan alat penangkapan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam, serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumber daya ikan di Indonesia yang sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan.

Pemerintah saat ini telah merumuskan suatu kebijakan pembangunan yang meletakkan sektor kelautan dan perikanan sebagai kekuatan baru penggerak perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai upaya mempertegas status dan kapasitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini didasari karena Indonesia merupakan kepulauan yang memiliki sumber daya kelautan yang cukup besar baik dari segi kuantitas maupun diversitasnya. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan untuk mendorong pemulihan ekonomi, karena itu kehadiran Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah haruslah lebih diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam peningkatan daya saing. Menyikapi hal tersebut dalam kebijakan pembangunan daerah, telah bertekad dan menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan dan penggerak pertumbuhan ekonomi domestik. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu sorotan pasca diterbitkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 lalu. Dan secara tidak langsung telah merubah wajah hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota.

Secara hukum maka Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, serta dalam masa 2 (dua) tahun kedepan seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 harus segera ditetapkan. Secara garis besar ada tiga urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, yaitu urusan pemerintahan absolut, konkuren dan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti politik luar negeri; pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional; dan agama. Urusan umum adalah urusan yang menjadi urusan pemerintahan baik di pusat, provinsi atau kabupaten/ kota, seperti: penanganan konflik, pembinaan kebangsaan, kordinasi tugas antar instansi pemerintah, dan lainnya.



Urusan pemerintahan konkuren adalah adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah inilah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Mengacu pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut maka urusan Kelautan dan Perikanan merupakan kewenangan Pemda sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) poin (a). Selain itu, pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan potensi lautnya sampai 12 mil. Selain kegiatan penertiban ijin usaha perikanan tangkap untuk perikanan berukuran di atas 5 GT sampai 30 GT, serta pengawasan sumber daya kelautan. Selain itu tersirat dijelaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan, kehutanan serta pertambangan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten/kota antara lain seperti surat izin usaha perikanan, penangkapan ikan, pengangkutan komoditas perikanan dan izin pengelolaan budidaya perikanan dan lainnya.

Kewenangan daerah provinsi di laut sesuai Pasal 27 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut seperti eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; pengaturan administratif; pengaturan tata ruang ikut serta dalam memelihara keamanan di laut dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Serta untuk pembagian hasil perikanan antara pusat dan provinsi.

Kewenangan Kabupaten Jember dalam pengelolaan kawasan laut semakin terbatas sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Undang-undang yang telah diterbitkan sejak 16 Januari 2015 itu mengatur jika sebagian besar potensi kelautan dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Beberapa potensi kelautan yang sebelumnya dikelola pemerintah kabupaten (pemkab), kini sudah harus dikelola Pemprov. Sementara tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember di dalam pengelolaan laut dan pesisir hanya tersisa pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan

pemberdayaan nelayan kecil. Dengan adanya undang-undang tersebut kewenangan kabupaten untuk mengelola laut tidak ada. Kabupaten hanya diberikan dua kewenangan saja, selebihnya kewenangan provinsi. Peralihan pengelolaan ini dikhawatirkan akan menjadikan kawasan laut di Kabupaten Jember menjadi tidak terurus. Mengingat selama ini yang lebih mengetahui kondisi kelautan di setiap kabupatennya merupakan pemerintah kabupaten itu sendiri. Kekhawatiran ini cukup beralasan. Sebab, sejak diterbitkannya undang-undang tersebut belum ada tanda-tanda Pemprov Jawa Timur akan membentuk personil, sarana prasarana, pendanaan dan dokumen (P3D). Padahal hal itu sudah harus terbentuk maksimal dua tahun sejak diterbitkannya undang-undang.

### **3.2 Hambatan dan Tantangan Yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Dan Kelautan**

Untuk dapat menerapkan kebijakan pembangunan perikanan diperlukan instrumen hukum dan kelembagaan yang memadai. Implementasi dan penegakan hukum (*law enforcement*) bidang perikanan di Indonesia dinilai masih lemah. Sanksi hukum bagi perusak lingkungan masih terlalu ringan, seperti bagi pengguna bahan-bahan peledak, bahan beracun (*cyanida*), dan juga aktivitas penangkapan ikan secara ilegal, penambangan karang untuk bahan bangunan, reklamasi pantai, kegiatan pariwisata yang kurang bertanggungjawab, dan seterusnya. Di sisi lain, terjadi juga tumpang tindih (*over lapping*) kebijakan yang seringkali menimbulkan konflik kewenangan.

Penegakan hukum ketentuan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Kabupaten Jember pelaksanannya sudah baik dan efektif. Penegakan hukum tersebut dirasakan efektif dengan kerjasama dan upaya preventif yang dilakukan oleh nelayan setempat dalam meng-*cover* pelanggaran yang terjadi dalam penangkapan ikan. Namun demikian dalam lingkup penegakan hukum berupa pemberian sanksi belum terlaksana, karena beberapa pelanggaran misalnya penangkapan ikan dengan peledak atau dengan pukat harimau salah satunya di pantai Puger Jember belum efektif dilaksanakan. Upaya preventif berupa penerangan dan nasihat kepada nelayan-nelayan setempat mampu memberikan masukan yang berarti bagi nelayan sehingga

penagakan hukum perikanan di Kabupaten Jember cukup efektif dan berhasil. Selama ini tindakan nyata dari petugas bagi nelayan yang melanggar adalah dengan memberi nasehat atau bimbingan saja, selain itu, sebagian besar nelayan telah memahami pengelolaan perikanan yang baik, sehingga bila ada pelanggaran yang dilakukan nelayan lain maka mereka biasanya ikut melakukan pengawasan atau pengarahan melalui paguyuban nelayan setempat.

Oleh karena itu, dengan hadirnya Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan diharapkan dapat menjadi alat untuk pelaksanaan pengelolaan perikanan menjadi lebih baik, salah satunya dengan penerapan sanksi hukum yang berat dan tegas. Namun demikian penerapan Undang Undang tersebut harus dilakukan dengan sosialisasi dan pendekatan yang baik sehingga dapat dilaksanakan sepenuhnya. Masalah lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah terkait dengan adanya perlindungan hukum terhadap nelayan kecil dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia, dikaitkan dengan eksploitasi dari nelayan berskala besar maupun adanya tengkulak.

Butuh waktu yang lama untuk mengurai satu demi satu permasalahan nelayan di atas. Pada kesempatan ini cukup kita fokuskan pada peran tengkulak yang menjadi problematika tak berkesudahan bagi nelayan dan selalu muncul dalam setiap laporan penelitian sosial ekonomi nelayan. Setuju atau tidak, negara kita menganut sistem ekonomi kapitalis. Pada sistem ini, aktifitas ekonomi tengkulak adalah hal yang dianggap sah-sah saja, karena mereka adalah para pemilik modal (*capital holder*) yang boleh melakukan apa saja selama saling membutuhkan. Maka dari kaca mata bisnis, tengkulak adalah sebuah sistem ekonomi yang sah. Dimana setiap pebisnis, apapun bentuknya baik firma ataupun perseorangan, tentu akan berupaya untuk mempertahankan bisnisnya. Upaya tersebut bisa dalam bentuk discount, iklan, entertain, pembentukan opini, dan sebagainya.

Sebagai sistem ekonomi, tengkulak pun mengeluarkan biaya "iklan" dan "entertain" untuk mempertahankan bisnisnya. Bentuknya adalah dengan melakukan pendekatan sosial (*social approach*). Mereka dapat memberikan pinjaman tanpa kolateral (agunan) kepada para nelayan kapanpun mereka butuhkan. Tentu dengan harapan agar mereka tetap terikat dan tidak lari kepada

tengkulak lain. Mirip dengan iklan berhadiah produk-produk di televisi yang selalu ingin mengikat pelanggannya. Hasilnya, kemiskinan nelayan tetap terpelihara karena monopoli harga ikan dan sistem pemasaran ditentukan oleh sang tengkulak.

Sama sekali tidak ada yang salah dengan sistem itu, karena itu adalah gambaran kecil dari sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia. Para pemodal besarlah yang memiliki sistem kekuasaan ekonomi. Kita bisa melihat bagaimana supermarket waralaba sampai berdiri megah di sudut-sudut desa. Makanya, apapun upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, jika tanpa menyentuh sistem ekonomi yang sudah mendarahdaging ini, maka bagaikan upaya menggantang asap.

Dibentuknya Asosiasi Punggawa Nasional (APN). Karena memang dari kacamata pebisnis sejati, punggawa atau tengkulak adalah sebuah sistem ekonomi yang tidak melanggar prinsip ekonomi, apalagi belum ada peraturan perundangan yang mengatur tentang tengkulak. Tentu ide dan persetujuan wapres ini bukan untuk mengekalkan kemiskinan nelayan (*sustainable poverty*), karena tidak mungkin seorang negarawan melakukan ide yang kontraproduktif dengan program-programnya sendiri. Mungkin beliau berpendapat, dengan dibentuknya wadah para tengkulak itu, maka pemerintah dapat mulai "mewarnai" sistem ekonomi mereka yang sudah diwariskan secara turun temurun itu.

Dalam teori ekonomi dikenal istilah kesempurnaan pasar (*perfect market*). Secara sederhana, keadaan inilah yang diharapkan oleh semua orang untuk terjadi, karena pada kondisi ini semua pihak akan merasa senang. Sama-sama untung dan tidak ada yang membatasi dan menghambat dalam setiap tahapan interaksi. Dalam tataran praktis, tentu sistem ini belum pernah terwujud, karena akan cukup sulit untuk memuaskan semua orang. Pasti akan selalu ada elemen yang ingin meraup keuntungan lebih, sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu untuk meraih sebesar-besarnya keuntungan dengan mengefisienkan upaya. Dan ada pula yang dirugikan atau bahkan terlempar dari mekanisme pasar.

Itulah alasannya mengapa pemerintah, sebagai pihak yang melindungi semua komponen pasar, harus menyediakan instrumen untuk menjaga agar tidak

terjadi kegagalan pasar (*market failure*). Pemerintah perlu melakukan intervensi terhadap pasar, melalui berbagai instrumennya, agar roda perekonomian dapat tetap berjalan. Dari sinilah kita mengenal istilah kebijakan subsidi (*subsidy*) untuk petani atau nelayan kecil, karena mereka tidak mampu menyediakan unsur faktor produksi, seperti pupuk atau BBM. Tanpa subsidi, mustahil ada beras dan ikan, karena biaya produksi lebih besar dari pada keuntungan (*non-profitable*). Selain itu kita juga mengenal istilah-istilah lain seperti kebijakan fiskal dan moneter, pengurangan pajak, deregulasi, anti-monopoli, dan sebagainya.

Pemerintah perlu memikirkan peraturan yang dapat membantu nelayan kecil keluar dari mekanisme pasar yang seperti ini. Tentu bukan dengan memusuhi tengkulak, karena sesuai dengan hukum ekonomi, mereka tidak dapat dipersalahkan. Begitu pula dari sisi hukum budaya, karena pada kenyataannya mereka adalah orang-orang yang dihormati dan dibela oleh para pekerjanya. Pemerintah dapat menciptakan suatu sistem ekonomi yang saling kait mengait antara pekerja, tengkulak, TPI, koperasi dan pemerintah sebagai pengawas dan pengendali. Bisa saja para tengkulak dirangkul dan diberikan bantuan modal oleh pemerintah, karena memang merekalah yang dianggap layak (*bankable*). Selanjutnya bantuan itu dapat digunakan untuk membiaya para anggotanya atau memperluas usahanya. Tapi mereka dipagari oleh aturan-aturan yang mengatur jalur pasar ikan, mulai dari produksi sampai pemasaran. Keterkaitan semua komponen harus diatur, sehingga jalur-jalur distribusi ikan yang tidak melalui mekanisme ini dapat diperiksa oleh pos-pos retribusi hasil laut yang ada di jalan raya. Pada tingkat daerah, regulasi intervensi pemerintah semacam ini dapat dipikirkan mekanismenya dan diputuskan melalui perda atau peraturan kepala daerah.

Sebenarnya pemerintah sudah lama memikirkan nasib petani dan nelayan kecil ini, bahkan mulai dari zaman orde lama. Pemerintahan yang berbau "sosialis" itu justru telah mengeluarkan sebuah Undang-Undang yang betul-betul melindungi rakyat kecil, baik petani maupun nelayan, yaitu Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perdjandjian Bagi Hasil (Pertanian) dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Bahkan pelaksanaan bagi hasil ini harus diawasi oleh pemerintah daerah untuk

menghindari pemerasan dan ketidakadilan. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut betul-betul mengatur secara rinci praktek bagi hasil usaha perikanan. Seperti Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 1964 menyebutkan bahwa : "Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi-hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut: Untuk perikanan laut : a. jika dipergunakan perahu layar : minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih ; b. jika dipergunakan kapal motor : minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih...."

Sementara Pasal 3 ayat (2) menyebutkan: Pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan, bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

Itulah bagaimana pemerintah sebenarnya sejak dahulu telah memperhatikan kesejahteraan nelayan, sampai masalah bagi hasil saja harus diatur oleh sebuah undang-undang. Entah kenapa kemudian pada prakteknya peraturan semacam ini malah tidak diaplikasikan. Apakah mungkin karena "sistem ekonomi kapitalis" berkedok "ekonomi pancasila" kemudian tumbuh subur pada era selanjutnya bahkan menjadi haluan sistem ekonomi negara? Atau karena undang-undang tadi merupakan produk orde lama yang berbau sosialis? Yang dapat menjawab hal ini adalah mereka yang mengalami sejarah itu sendiri.

Kalau dilihat dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 1964 itu memang dalam konsideran "menimbang" dinyatakan sebagai berikut : "bahwa a) sebagai salah satu usaha untuk menuju kearah perwujudan masyarakat sosialis Indonesia pada umumnya, khususnya untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan, maka pengusaha perikanan secara bagi-hasil, baik perikanan laut maupun perikanan darat, harus diatur hingga dihilangkan unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan dan semua pihak yang turut serta masing-masing mendapat bagian yang adil dari usaha itu; b) bahwa selain perbaikan daripada syarat-syarat perjanjian bagi-hasil

sebagai yang dimaksudkan diatas perlu pula lebih dipergiat usaha pembentukan koperasi-koperasi perikanan, yang anggota-anggotanya terdiri dari semua orang yang turut serta dalam usaha perikanan itu

Belum didapatkan informasi apakah Undang Undang No.2 Tahun 1960 dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1964 telah dicabut. Kalau memang belum dicabut, maka ide dasar dari Undang Undang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintahan saat ini untuk menyusun sebuah kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah market failure yang telah diciptakan oleh sistem ekonomi tengkulak tadi untuk selanjutnya melindungi kepentingan ekonomi semua pihak, termasuk tengkulak itu sendiri.

Salah satu wilayah di Kabupaten Jember yang merupakan basis nelayan adalah wilayah Kecamatan Puger. Kawasan pesisir pantai Puger berada di sebelah selatan desa Puger Kulon dan Puger wetan. Di wilayah tersebut terdapat Tempat Pelelangan Ikan dan pelabuhan. Banyak kapal/perahu dan jukung yang menambatkan armadanya di sepanjang pelabuhan dan di bantaran sungai Bedadung dan sungai Besini. Ikan juga diperdagangkan di TPI tersebut. Namun perdagangan yang dijalankan hanya untuk kebutuhan konsumen rumah tangga, bukan untuk kebutuhan konsumen besar/perusahaan/pabrik. Berbagai jenis hasil laut yang diperdagangkan antara lain, ikan asin, terasi, petis, ikan segar, ikan pindang, kepiting, serta cumi. Sedangkan untuk penjualan secara besar-besaran nelayan biasanya langsung menjualkan ikannya kepada pengambek.

Wilayah pelabuhan atau tempat perahu ditambatkan berada di sekitar pinggir bibir kedua desa tersebut. Wilayah pelabuhan ini berada masuk diantara dua pertemuan sungai besar yaitu sungai Bedadung dan sungai Besini. Dan pertemuan kedua sungai tersebut berada didekat gunung Watangan. Jadi ada semacam delta untuk masuk ke pelabuhan Puger. delta tersebut sering terjadi pendangkalan, oleh karena itu dalam jangka waktu tertentu dilakukan pengerukan. Delta yang sekaligus pintu keluar masuknya perahu nelayan disebut dengan "Plawangan".

"Plawangan" ini sering memakan korban. Terutama ketika sebelum dibangunnya break water. Wilayah plawangan ini bawahnya merupakan karang dan tidak cukup lebar jika dilalui oleh dua perahu payang. Biasanya hanya satu

perahu yang dapat melewati plawangan. Selain itu harus melihat keadaan air dan gelombang. Kondisi air pasang dan gelombang tidak besar merupakan kondisi yang baik untuk melewati plawangan tersebut. Untuk dapat melewatinya, baik keluar pelabuhan maupun masuk pelabuhan nelayan harus menghitung gulungan ombak yang masuk. Dengan hitungan yang tepat maka nelayan dapat dengan selamat melewati pelawangan tersebut. Banyaknya korban dan naik turunnya hasil tangkapan ikan inilah yang mendorong nelayan untuk diadakannya suatu upacara sedekah laut. Upacara itu dikenal dengan upacara larung sesaji "Petik Laut". Upacara petik laut ini sudah dilakukan sejak lama oleh nelayan Puger.

Dulu upacara ini dilakukan dengan sederhana, hanya sekumpulan nelayan yang melarung sesaji ke laut. Perkembangan upacara petik laut sekarang tidak sesederhana dahulu. Perubahan yang significant terjadi ketika kepemimpinan camat bapak Bambang Wahyudi sekitar tahun 1992/1993. Upacara petik laut dikemas dengan menggunakan paket wisata. Jadi tidak hanya dilakukan oleh nelayan sekelompok saja, namun diadakan semacam upacara formal, dengan berbagai macam doa. Setelah itu diadakan kirap bersama dengan sesaji-sesaji yang akan dilarung di laut. Upacara ini sangat meriah sekali, apalagi di tambah dengan adanya hiburan wayang dan pameran hasil pembangunan dari kedua desa. Biaya untuk upacara petik laut ini hasil dari swadaya masyarakat nelayan Puger dan dari bantuan sponsor-sponsor lain. Tradisi upacara petik laut tersebut terus berlangsung sampai sekarang.

Upacara petik laut ini akhirnya dijadikan salah satu agenda wisata di kecamatan Puger. Potensi wisata tidak hanya ini saja, namun ada tempat wisata yang lain seperti wisata pantai pancer dan wisata pulau kucur. Bahkan saat ini kawasan pantai Puger akan dijadikan kawasan wisata oleh pemkab Jember. Nantinya kawasan ini diharapkan dapat berkembang dengan pesat seiring dengan adanya Jalur Lintas Selatan yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, dimana nantinya akan dibangun sebuah jembatan yang melintasi delta di pesisir pantai Puger. Dengan pembangunan ini diharapkan dapat memberikan perubahan yang positif bagi perkembangan masyarakat Puger terutama bagi kominutas nelayan Puger.



Samudera Indonesia/Segoro Kidul : Segoro Kidul (laut selatan) begitu masyarakat Puger menamakan Samudera Indonesia yang terbentang luas di bagian selatan Puger. Samudera Indonesia dengan ombak yang besar merupakan sumber hewani yang potensial untuk pemenuhan kebutuhan pangan manusia. Segoro Kidul/Samudera Indonesi menyediakan berbagai sumber pangan hayati maupun hewani yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Banyak jenis ikan yang hidup di Samudera Indonesia. Lautan terbuka merupakan jalur dari suatu pelayaran bebas antara satu pulau dengan pulau lainnya. Wilayah bagian Selatan Puger menjadi ruang terbuka bagi datangnya para pelaut dari berbagai pulau yang mengarungi luasnya Samudera Indonesia. Dari data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember menyebutkan bahwa jumlah nelayan di Kecamatan Puger sampai akhir tahun 2013 adalah 17.903 orang, namun data tersebut belum dapat dikatakan valid karena dapat bertambah dan berkurang, karena tergantung hasil tangkapan nelayan. Jumlah tangkapan ikan tahun 2013 dari Nelayan di wilayah Watu Ulo, Puger dan Paseban adalah 8.230,20 ton.

Kendala lain yang dihadapi oleh nelayan kecil adalah manakala kondisi tangkapan sepi seperti saat padang bulan (bulan penuh) beberapa nelayan yang tidak punya alternatif pekerjaan lain lebih memilih berutang atau menjual barang-barang di rumah. Beberapa lainnya memilih pekerjaan alternatif lain seperti menjadi buruh tani, menjadi tukang bangunan, tukang ojek, tukang becak dan lain sebagainya. Hal tersebut juga patut menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Kabupaten Jember.

Sumber daya perikanan merupakan sumber daya yang dapat pulih kembali atau *renewable resources*, namun demikian tetap ada batas-batasnya. Apabila sumber daya ikan dimanfaatkan tanpa batas atau tidak rasional serta melebihi batas optimal dapat mengakibatkan kerusakan atau terancamnya kelestarian. Pemanfaatan berlebihan yang mempunyai dampak kurang menguntungkan terhadap pelestarian sumber daya ikan, perlu dicegah dengan suatu pengaturan yang baik sehingga usaha perikanan akan berjalan berkelanjutan karena masih dalam ambang batas potensi lestari yang aman.

Kegiatan usaha penangkapan ikan akan terus berkembang pada masa sekarang dan masa yang akan datang seiring dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi perikanan. Daerah operasi nelayan yang semula hanya berada di sepanjang pinggiran pantai, berubah ke perairan laut yaitu ke suatu daerah penangkapan (*fishing ground*) yang lebih jauh lagi ; bahkan mencapai daerah lain, propinsi atau berbatasan dengan mancanegara. Keadaan semacam ini seringkali menyebabkan rawan konflik antar nelayan pendatang (nelayan andon) dengan nelayan setempat ; walaupun pada dasarnya laut tidak bisa dibagi-bagi karena merupakan satu kesatuan yang utuh.

Guna menghindari kemungkinan timbulnya berbagai permasalahan akibat situasi tersebut, maka yang perlu diperhatikan adalah mengatur jenis usaha serta jumlah nelayan yang diperbolehkan beroperasi di daerah penangkapan tanpa memandang asal-usulnya. Namun demikian, adalah sangat bijak jika nelayan setempat menjadi prioritas utama melakukan usahanya disitu, termasuk nelayan yang sudah tradisi mencari ikan di tempat yang sama, semacam Hak Guna Wilayah Hukum Perikanan bagi nelayan tradisional. Sisi lain pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan perlu dilakukan agar tidak timbul persaingan kepentingan yang berdampak negatif terhadap kerusakan sumber daya ikan, bahkan lebih luas lagi akan menimbulkan kerawanan sosial dan pada akhirnya bisa saja mengakibatkan kerawanan sosial budaya di daerah tersebut.

Itulah alasannya mengapa pemerintah, sebagai pihak yang melindungi semua komponen pasar, harus menyediakan instrumen untuk menjaga agar tidak terjadi kegagalan pasar (*market failure*). Pemerintah perlu melakukan intervensi terhadap pasar, melalui berbagai instrumennya, agar roda perekonomian dapat tetap berjalan. Dari sinilah kita mengenal istilah kebijakan subsidi (*subsidy*) untuk petani atau nelayan kecil, karena mereka tidak mampu menyediakan unsur faktor produksi, seperti pupuk atau BBM. Tanpa subsidi, mustahil ada beras dan ikan, karena biaya produksi lebih besar dari pada keuntungan (*non-profitable*). Selain itu kita juga mengenal istilah-istilah lain seperti kebijakan fiskal dan moneter, pengurangan pajak, deregulasi, anti-monopoli, dan sebagainya.

Sumber daya perikanan merupakan sumber daya yang dapat pulih kembali atau *renewable resources*, namun demikian tetap ada batas-batasnya. Apabila sumber daya ikan dimanfaatkan tanpa batas atau tidak rasional serta

melebihi batas optimal dapat mengakibatkan kerusakan atau terancamnya kelestarian. Pemanfaatan berlebihan yang mempunyai dampak kurang menguntungkan terhadap pelestarian sumber daya ikan, perlu dicegah dengan suatu pengaturan yang baik sehingga usaha perikanan akan berjalan berkelanjutan karena masih dalam ambang batas potensi lestari yang aman.

Kegiatan usaha penangkapan ikan akan terus berkembang pada masa sekarang dan masa yang akan datang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan. Daerah operasi nelayan yang semula hanya berada di sepanjang pinggiran pantai, berubah ke perairan laut yaitu ke suatu daerah penangkapan (*fishing ground*) yang lebih jauh lagi ; bahkan mencapai daerah lain, propinsi atau berbatasan dengan mancanegara. Keadaan semacam ini seringkali menyebabkan rawan konflik antar nelayan pendatang (nelayan andon) dengan nelayan setempat ; walaupun pada dasarnya laut tidak bisa dibagi-bagi karena merupakan satu kesatuan yang utuh.

Guna menghindari kemungkinan timbulnya berbagai permasalahan akibat situasi tersebut, maka yang perlu diperhatikan adalah mengatur jenis usaha serta jumlah nelayan yang diperbolehkan beroperasi di daerah penangkapan tanpa memandang asal-usulnya. Namun demikian, adalah sangat bijak jika nelayan setempat menjadi prioritas utama melakukan usahanya disitu, termasuk nelayan yang sudah tradisi mencari ikan di tempat yang sama, semacam Hak Guna Wilayah Hukum Perikanan bagi nelayan tradisional. Sisi lain pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan perlu dilakukan agar tidak timbul persaingan kepentingan yang berdampak negatif terhadap kerusakan sumber daya ikan, bahkan lebih luas lagi akan menimbulkan kerawanan sosial dan pada akhirnya bisa saja mengakibatkan kerawanan sosial budaya di daerah tersebut.

Pemahaman semua pihak terhadap tata cara pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan dalam suatu kawasan perairan laut dimaksudkan sebagai upaya terjaminnya kelestarian sumber daya laut, kesinambungan usaha, serta mencegah konflik sosial di antara nelayan. Berdasarkan hal tersebut Dinas Perikanan dan Kelautan Jember dilaksanakan sistem *monitoring, controlling* dan *survilances* (MCS) yang teratur dan berkesinambungan, yaitu :

- *Monitoring* sebagai kegiatan untuk dapat mengetahui status sumber daya perikanan sehingga diperoleh data akurat yang dapat dijadikan dasar bagi pengaturan pemanfaatan yang harus dikeluarkan
- *Controlling* merupakan kegiatan untuk mengendalikan segala kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta tujuan pengelolaan sumber daya perikanan.
- *Survilances* adalah kegiatan pengawasan untuk ditaatinya ketentuan peraturan-peraturan pengelolaan sumber daya perikanan yang diikuti dengan sanksi bagi pelanggarnya.

Dengan rencana *monitoring*, *controlling* dan *survilances* seperti tersebut di atas, berarti secara teratur dapat dipantau kemunduran atau peningkatan daya dukung dan kemampuan optimal sumber daya perikanan di perairan laut khususnya di wilayah Kabupaten Jember serta dapat juga berperan sebagai upaya pengendalian cara pemanfaatan sumber daya ikan yang benar-benar terarah.

Kembali kepada pokok permasalahan bahwasanya yang menjadi titik fokus penulis pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya kewenangan dalam bidang perikanan dan menarik untuk saya kritisi adalah pada pembagian urusan bidang antara Pemerintah pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terkhusus pada sektor kelautan dan perikanan. Pada undang undang tersebut terjadi banyak pembatasan-pembatas kinerja Kabupaten/kota yang diambil alih oleh Pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota terkesan tidak diberi akses banyak untuk mengembangkan daerahnya sehingga daerah makin tak berdaya. Misalnya dalam urusan Kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, 70% diambil alih oleh pemerintah pusat dan 30% diambil alih oleh Pemerintaah Daerah Provinsi dan tanpa melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini bisa menimbulkan banyak sekali masalah ketika hampir keseluruhan urusan daerah di urus oleh pusat. Contohnya saja dalam hal Database pesisir dan pulau-pulau kecil yang kewenangannya dilakukan oleh Pemerintah pusat. Kenapa urusan hal pendataan seperti ini tidak diserahkan saja kepada Pemeritah Kabupaten/kota yang wilayahnya akan dilakukan pendataan. Contoh lain, pemberdayaan Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang urusannya di tangani oleh

Pemerintah Daerah Provinsi. Sebaiknya urusan Pemberdayaan masyarakat seperti ini langsung ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, hal ini terkait akses atau alur-alur informasi tidak terlalu jauh dan panjang.

Dalam urusan perikanan tangkap, Ukuran porsi Pemerintah pusat masih mendominasi yaitu 50%, Provinsi 40 % dan Kabupaten/Kota 10%. Dominasi Pemerintah pusat dalam urusan perikanan tangkap di daerah tentu bisa saja mempunyai dampak buruk pada daerah tersebut. Misalnya Terkait berbagai perizinan yang pengelolannya ke Pusat dan Pemerintah Provinsi tentu berdampak pada pendapatan hasil daerah pada Kabupaten/Kota. Hal lain dalam urusan Pengolahan dan pemasaran, Pemerintah pusat mengambil 80%, Pemerintah Daerah provinsi 20%, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mendapatkan kewenangan dalam urusan Pengolahan dan pemasaran. Belum lagi urusan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mana semuanya 100% kewenangan dilakukan oleh pusat.

Kebijakan yang dibuat dalam Undang-undang ini secara perlahan melemahkan bahkan mematikan potensi daerah. Daerah akan terkesan malas karena segala urusan sudah ditangani oleh pemerintah pusat dan provinsi. Di sisi lain, kebijakan ini bisa saja menurunkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) dan juga ketika terjadi masalah di daerah terkait berbagai kebijakan yang ditangani oleh pusat, penanganannya semua harus ke pemerintah pusat. Tentu hal ini sangat merepotkan dikarenakan akses yang cukup jauh. Kebijakan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam pembagian urusan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota berindikasi pada banyak pemborosan anggaran atau penggunaan anggaran yang tidak perlu. Misalnya dalam hal-hal yang selama ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kewenangan baru berdasar Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah pusat atau provinsi dituntut untuk melakukan hal yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Tentu hal ini bagian dari pemborosan.

Daerah harus tetap terlibat dalam pengelolaan kelautan dan perikanannya, jangan hanya menerima menjalankan kebijakan provinsi dan

pusat karena yang mempunyai tempat/wilayah pengelolaan adalah Pemerintah Kabupaten/Kota. Seharusnya dalam pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus memberikan porsi yang lebih banyak kepada Pemerintah Kabupaten/Daerah. Porsi daerah dalam pembagian urusan harus lebih besar pembagiannya dalam hasil sumberdaya alam, mineral dan non mineral. Porsi Daerah 60% Provinsi 20% dan Pusat 20%. Dengan porsi seperti ini, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab penuh dalam membangun daerahnya. Berbagai urusan yang di buat tentu menjadikan Pemerintah Kabupaten/kota terlihat aktif hal ini bisa saja meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan PAD setiap daerah.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam kaitannya dengan pokok permasalahan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan adanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi baru bagi pembangunan wilayah laut dan pengelolaan sumber daya perikanan. Bila sebelumnya seluruh wilayah perairan laut Indonesia berada pada wewenang pemerintah pusat, maka dengan Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah memiliki wewenang atas sebagian wilayah perairan laut. Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut minimal memiliki dua implikasi terhadap kegiatan sumberdaya laut, khususnya dalam hal perwilayahan daerah penangkapan ikan, yaitu : (1) Daerah propinsi harus dengan lebih pasti mengetahui potensi perikanan serta batas-batas wilayahnya sebagai dasar untuk menentukan jenis dan tipe kegiatan perikanan yang sesuai di daerahnya, (2) Daerah propinsi harus mampu mengalokasikan 4 mil laut dari 12 mil laut yang berada di bawah wewenangnya kepada kota/kabupaten yang selanjutnya dikelola pemanfaatannya. Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara prinsip memberikan dasar-dasar sangat berbeda bagi kewenangan kabupaten atau kota terkait tata kelola sumberdaya alam, termasuk sumberdaya perikanan.
2. Hambatan pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya kewenangan dalam bidang perikanan dan bahwa pada pembagian urusan bidang antara Pemerintah pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terkhusus pada sektor kelautan dan perikanan. Pada undang undang tersebut terjadi banyak pembatasan-pembatas kinerja Kabupaten/kota yang diambil alih oleh Pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota terkesan tidak diberi akses banyak

untuk mengembangkan daerahnya sehingga daerah makin tak berdaya. Misalnya dalam urusan Kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, 70% diambil alih oleh pemerintah pusat dan 30% diambil alih oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan tanpa melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### 4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan peran dan perhatian Pemerintah Daerah dalam pembangunan perikanan khususnya dalam ikut menjaga kelestarian sumber daya laut dan perikanan, serta perhatian terhadap nelayan kecil setempat sehingga dapat mewujudkan sistem manajemen pengelolaan perikanan yang baik.
2. Seharusnya dalam pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus memberikan porsi yang lebih banyak kepada Pemerintah Kabupaten/Daerah. Porsi daerah dalam pembagian urusan harus lebih besar pembagiannya dalam hasil sumberdaya alam, mineral dan non mineral. Porsi Daerah 60% Provinsi 20% dan Pusat 20%. Dengan porsi seperti ini, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab penuh dalam membangun daerahnya. Berbagai urusan yang di buat tentu menjadikan Pemerintah Kabupaten/kota terlihat aktif hal ini bisa saja meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan PAD setiap daerah.



**DAFTAR PUSTAKA**

Buku Literatur :

- Aan Eko Widarto, *Penguatan Hak Nelayan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut*, Universitas Brawijaya, Malang, 2008
- Ali Faried, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2005
- Eggy Sudjana, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta, Rinneka Cipta, 2005
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Jakarta : Rineka Cipta. 2011
- Jimly Assiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Konstitusi Press, 2005.
- , *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007
- J. Kaloh, *Otonomi Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- Nur Feriyanto, *Pemberdayaan Daerah Melalui Kerja Sama Antar Daerah*, Kedaulatan Rakyat Press, 2001
- Payaman Simanjuntak, *Pengantar Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, 1986
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Pers, Cetakan ke-10, 2008
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, eds. kesatu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Syaukani dan Afan Gafar, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007
- Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 2002, Jakarta, Fokus Media
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006

J. Satrio, 1986, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang Undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta, 2002

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lingkup Urusan Pemerintah di Bidang Perikanan dan Kelautan



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1/PERMEN-KP/2014

TENTANG

LINGKUP URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2014 YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL  
PEMERINTAH DALAM RANGKA DEKONSENTRASI DAN DITUGASKAN KEPADA  
PEMERINTAH PROVINSI ATAU PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM  
RANGKA TUGAS PEMBANTUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 Yang Dilimpahkan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Tugas Pembantuan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
18. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
20. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.15/MEN/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 858);
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LINGKUP URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2014 YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA DEKONSENTRASI DAN DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI ATAU PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah tertentu.
2. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
4. Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
5. Anggaran pendapatan dan belanja negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.
6. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal lingkup Kementerian.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
11. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan di daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 2

- (1) Pelimpahan sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan dari Kementerian kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan penugasan sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan dari Kementerian kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
- (2) Pelimpahan sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan dari Kementerian kepada Gubernur dan penugasan sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan dari Kementerian kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan kelautan dan perikanan sesuai Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian, dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian.

Pasal 3

- (1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan Tahun 2014 kepada Gubernur merupakan kegiatan yang bersifat non-fisik bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2014 yang ditugaskan kepada pemerintah daerah merupakan kegiatan yang bersifat fisik di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2014 yang dilimpahkan kepada Gubernur dan ditugaskan kepada pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas program yang meliputi:
  - a. pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap;
  - b. peningkatan produksi perikanan budidaya;
  - c. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - d. pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
  - e. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - f. pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
  - g. pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
  - h. peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Kementerian.

Pasal 4

Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi kegiatan:

- a. pengelolaan sumber daya ikan;
- b. pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan;
- c. pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan;
- d. pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan;

e. pengembangan ...

- e. pengembangan usaha penangkapan; dan
- f. peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

#### Pasal 5

Program peningkatan produksi perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi kegiatan:

- a. pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan;
- b. pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan;
- c. pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan;
- d. pengembangan sistem perbenihan ikan;
- e. pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan; dan
- f. peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

#### Pasal 6

Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi kegiatan:

- a. fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan;
- b. fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri;
- c. fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran luar negeri;
- d. fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan;
- e. fasilitasi pengembangan produk hasil perikanan nonkonsumsi; dan
- f. peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

#### Pasal 7

Program pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d meliputi kegiatan:

- a. penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- b. pengelolaan dan pengembangan konservasi, kawasan, dan jenis ikan;
- c. pendayagunaan pesisir dan lautan;
- d. pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- e. pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha; dan
- f. peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

#### Pasal 8

Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e meliputi kegiatan:

- a. peningkatan ...



- a. peningkatan operasional pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengembangan infrastruktur pengawasan;
- b. peningkatan operasional pengawasan sumber daya perikanan;
- c. peningkatan operasional pengawasan sumber daya kelautan;
- d. penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
- e. peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

#### Pasal 9

Program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f meliputi kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan.

#### Pasal 10

Program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g meliputi kegiatan:

- a. pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- b. peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

#### Pasal 11

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h meliputi kegiatan pembinaan dan koordinasi perencanaan, penganggaran dan monitoring dan evaluasi pembangunan kelautan dan perikanan;

#### Pasal 12

Rincian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2014 yang dilimpahkan kepada Gubernur dan ditugaskan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 13

- (1) Dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan di daerah dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.

- (3) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. perkembangan realisasi penyerapan dana;
  - b. pencapaian target keluaran;
  - c. kendala yang dihadapi; dan
  - d. saran tindak lanjut.
- (4) Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. laporan keuangan yang meliputi realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan; dan
  - b. laporan barang.
- (5) Bentuk dan isi laporan manajerial dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Kepala SKPD Provinsi dan/atau kabupaten/kota selaku kuasa pengguna anggaran/barang wajib menyusun serta menyampaikan laporan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Gubernur dan Menteri melalui Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan/atau Kepala Badan yang membidangi program dan kegiatan paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya setelah triwulan berakhir dan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan/atau Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekapitulasi laporan manajerial dan melaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

#### Pasal 15

- (1) Kepala SKPD Provinsi dan/atau kabupaten/kota selaku kuasa pengguna anggaran/barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas.
- (2) Tata cara penyusunan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah dan penatausahaan barang milik negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 16

- (1) Kepala SKPD provinsi dan/atau kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) kepada Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan/atau Kepala Badan yang membidangi program dan kegiatan melalui Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/BW) yang telah ditetapkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- (2) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan/atau Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merkapitulasi laporan keuangan dan barang kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

#### Pasal 17

Laporan manajerial dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.

#### Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan pembinaan teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan yang membidangi program dan kegiatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sinkronisasi dan koordinasi, pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (4) Pengawasan intern atas pelaksanaan urusan bidang kelautan dan perikanan yang dilimpahkan dan ditugaskan dan reviu atas laporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian.

#### Pasal 19

- (1) Kepala SKPD provinsi dan/atau kabupaten/kota yang tidak menyampaikan laporan dana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa:
  - a. penundaan pencairan dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan untuk bulan berikutnya; dan
  - b. penghentian alokasi dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan Kepala SKPD provinsi dan/atau kabupaten/kota dari kewajiban menyampaikan laporan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.

#### Pasal 20

SKPD yang melaksanakan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dengan kinerja yang tidak baik atau tidak merealisasikan program dan kegiatan serta tidak menyampaikan laporan manajerial dan akuntabilitas secara tertib dapat dipertimbangkan sanksi berupa pengurangan/penghentian alokasi dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 21

- (1) Menteri dapat menarik kembali sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang dilimpahkan dan ditugaskan.
- (2) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang dilimpahkan dan ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22

Pedoman pelaksanaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan bagi kementerian, Gubernur, provinsi, dan kabupaten/kota, serta instansi terkait ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



  
Hanung Cahyono

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 1/PERMEN-KP/2014  
 TENTANG  
 LINGKUP URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN  
 PERIKANAN TAHUN 2014 YANG DILIMPahkan KEPADA  
 GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA  
 DEKONSENTRASI DAN DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH  
 PROVINSI ATAU PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA  
 TUGAS PEMBANTUAN

**RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2014 YANG DILIMPahkan  
 KEPADA GUBERNUR DAN DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH**

**Provinsi DKI Jakarta**

LOKASI/KEWENANGAN/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi DKI Jakarta</b>	<b>9,549,829</b>
<b>DEKONSENTRASI (Dekon)</b>	<b>6,236,429</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>	<b>209,050</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA (Dekon 01)</b>	<b>209,050</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monitoring Evaluasi (Monev) Pembangunan KKP	209,050
<b>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>579,425</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA (Dekon 05)</b>	<b>579,425</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)	237,000
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	73,600
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	80,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	120,245
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	68,580
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,065,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA (Dekon 07)</b>	<b>1,065,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	85,630
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	299,000
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	194,950
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K)	485,420
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>1,131,350</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA (Dekon 03)</b>	<b>1,131,350</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	53,900
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan	164,200
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	231,800
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	245,000
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	261,450
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	175,000
<b>Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>	<b>238,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA (Dekon 13)</b>	<b>238,000</b>
Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	213,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM)	25,000
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>224,855</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA (Dekon 12)</b>	<b>224,855</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	224,855
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,567,149</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA (Dekon 06)</b>	<b>1,567,149</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	215,000
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	556,619
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	158,180
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	185,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan	138,200
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)	314,150

**Provinsi DKI Jakarta**

LOKASI/KEWENANGAN/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,221,600</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA (Dekon 04)</b>	<b>1,221,600</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	147,150
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	119,500
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	8,500
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	446,500
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	210,550
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	289,400
<b>TUGAS PEMBANTUAN (TP) PROVINSI</b>	<b>3,313,400</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>2,500,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA (TP Provinsi 03)</b>	<b>2,500,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	2,500,000
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>813,400</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA (TP Provinsi 04)</b>	<b>813,400</b>
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	269,450
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	543,950



**Provinsi Jawa Barat**

LOKASI/KEWENANGAN/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>51,458,119</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>12,462,342</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>	<b>450,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT (Dekon 01)</b>	<b>450,000</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	450,000
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>687,165</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT (Dekon 05)</b>	<b>687,165</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	335,000
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	84,100
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	80,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	120,245
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	67,820
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,675,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT (Dekon 07)</b>	<b>1,675,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	200,000
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	650,000
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	260,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	565,000
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>2,258,193</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT (Dekon 03)</b>	<b>2,258,193</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	126,910
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	220,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	654,383
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	409,050
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	672,850
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	175,000
<b>Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>	<b>237,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT (Dekon 13)</b>	<b>237,000</b>
Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	200,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	37,000
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>1,593,180</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT (Dekon 12)</b>	<b>1,593,180</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1,593,180
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>2,124,761</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT (Dekon 06)</b>	<b>2,124,761</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	318,700
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	642,081
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	161,730
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	600,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan	66,350
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	335,900
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>3,437,043</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT (Dekon 04)</b>	<b>3,437,043</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	1,099,200
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	163,500
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	195,275
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	767,290
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	673,265
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	538,513
<b>TP PROVINSI</b>	<b>20,888,977</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>16,234,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT (TP Provinsi 03)</b>	<b>16,234,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	16,000,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	234,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>238,020</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT (TP Provinsi 06)</b>	<b>238,020</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	100,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	100,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	38,020

**Provinsi Jawa Barat**

LOKASI/KEWENANGAN/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>4,416,957</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT (TP Provinsi 04)</b>	<b>4,416,957</b>
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	2,725,580
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	1,611,337
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	80,040
<b>TP KABUPATEN (KAB.)/KOTA</b>	<b>18,106,800</b>
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>9,287,270</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUKABUMI (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>886,640</b>
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	886,640
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. CIREBON (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>4,469,110</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	3,407,940
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	1,061,170
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. INDRAMAYU (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>2,988,290</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	2,988,290
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KARAWANG (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>943,230</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	943,230
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>4,219,530</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUKABUMI (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>565,960</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	500,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	65,960
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. INDRAMAYU (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>374,850</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	300,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	74,850
<b>DINAS PERTANIAN KOTA BOGOR (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>765,820</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	500,000
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	200,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	65,820
<b>DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA TASIKMALAYA (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>563,910</b>
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	500,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	63,910
<b>DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB. BANDUNG BARAT (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>458,320</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	67,520
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	332,480
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	58,320
<b>DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. BOGOR (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>924,850</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	500,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	346,080
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	78,770
<b>DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. SUMEDANG (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>565,820</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	500,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	65,820
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>4,600,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. CIREBON (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	35,920
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	672,870
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	91,210
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUBANG (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	66,610
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	43,782
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	566,420
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	123,188
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. INDRAMAYU (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>1,000,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	61,540
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	850,800
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	87,660
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. KARAWANG (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	73,155
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	602,785



Provinsi Jawa Barat

LOKASI/KEWENANGAN/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (000)
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	124,060
<b>DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. BOGOR (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	45,754
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	149,415
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	331,715
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	123,116
<b>DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BEKASI (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>550,000</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	39,440
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	55,490
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	373,320
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	81,750



Provinsi Jawa Tengah

LOKASI/KEWENANGAN/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>100,950,252</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>14,074,663</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>	<b>400,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH (Dekon 01)</b>	<b>400,000</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	400,000
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>511,720</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH (Dekon 05)</b>	<b>511,720</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	210,000
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	100,100
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	40,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	93,240
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	68,380
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>2,265,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH (Dekon 07)</b>	<b>2,265,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	330,000
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	820,000
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	400,000
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	250,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	465,000
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>2,558,012</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH (Dekon 03)</b>	<b>2,558,012</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	131,306
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	220,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	502,779
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	711,100
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	817,827
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	175,000
<b>Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>	<b>421,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH (Dekon 13)</b>	<b>421,000</b>
Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	334,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	87,000
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>1,966,420</b>
<b>BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI JAWA TENGAH (Dekon 12)</b>	<b>1,966,420</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1,966,420
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>2,545,336</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH (Dekon 06)</b>	<b>2,545,336</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	336,325
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	733,703
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	164,358
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	700,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan	234,650
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	376,300
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>3,407,175</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH (Dekon 04)</b>	<b>3,407,175</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	386,455
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	496,880
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	142,230
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	906,310
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	1,312,100
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	163,200
<b>TP-PROVINSI</b>	<b>5,998,995</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>2,234,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH (TP Provinsi 03)</b>	<b>2,234,000</b>
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	234,000
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2,000,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>950,170</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH (TP Provinsi 06)</b>	<b>950,170</b>
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	861,750
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	50,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	38,420
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>2,814,825</b>

**Provinsi Jawa Tengah**

LOKASI/KEWENANGAN/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH (TP Provinsi 04)</b>	<b>2,814,825</b>
Pembangunan Sistem Perbenihan Ikan	486,500
Pembangunan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	2,209,400
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	118,925
<b>TP-KAB./KOTA</b>	<b>80,876,594</b>
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>12,008,670</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BREBES (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>1,457,370</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	1,457,370
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. DEMAK (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>2,342,280</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	1,274,870
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	1,067,410
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PATI (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>2,913,360</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	2,913,360
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. REMBANG (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>3,104,690</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	3,104,690
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JEPARA (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>1,297,370</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	1,297,370
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KENDAL (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>893,600</b>
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	893,600
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>53,000,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. DEMAK (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>3,000,000</b>
Pembangunan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	3,000,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KEBUMEN (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>25,000,000</b>
Pembangunan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	25,000,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KENDAL (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>3,500,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	1,500,000
Pembangunan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2,000,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PATI (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>1,500,000</b>
Pembangunan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1,500,000
<b>DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. TEGAL (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>20,000,000</b>
Pembangunan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	20,000,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>5,667,924</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BREBES (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>1,085,392</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	1,000,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	85,392
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. DEMAK (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>1,135,392</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	1,050,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	85,392
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KENDAL (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>1,578,912</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	1,500,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	78,912
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PATI (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>778,912</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	700,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	78,912
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. REMBANG (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>1,089,316</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	1,000,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	89,316
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>10,200,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BREBES (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pembangunan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	74,740
Pembangunan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	614,720
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	110,540
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. DEMAK (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pembangunan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	64,200
Pembangunan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	641,043
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	94,757
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JEPARA (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pembangunan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	70,750
Pembangunan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	619,430
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	109,820
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KENDAL (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>

**Provinsi Jawa Tengah**

LOKASI/KEWENANGAN/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (000)
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	33,300
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	686,060
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	80,640
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PATI (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	14,250
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	62,430
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	576,250
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	147,070
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PEMALANG (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	72,830
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	627,920
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	99,250
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. REMBANG (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	70,040
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	627,780
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	102,180
<b>DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN KAB. PEKALONGAN (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	46,520
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	57,750
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	615,560
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	80,170
<b>DINAS PERTANIAN KAB. KLATEN (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	558,074
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	91,926
<b>DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. BANJARNEGARA (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>850,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	103,244
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	643,566
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	103,190
<b>DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN KOTA PEKALONGAN (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	715,660
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	84,340
<b>DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUMAS (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>850,000</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	29,880
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	78,060
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	648,356
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	93,704
<b>DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOYOLALI (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	48,700
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	84,760
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	403,260
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	113,280

**Provinsi Jawa Timur**

LOKASI/KEWENANGAN/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Jawa Timur</b>	<b>79,395,325</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>17,038,104</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>	<b>400,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR (Dekon 01)</b>	<b>400,000</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	400,000
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>603,072</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR (Dekon 05)</b>	<b>603,072</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	260,000
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	100,100
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	90,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	82,400
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	70,572
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>2,625,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR (Dekon 07)</b>	<b>2,625,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	400,000
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	1,050,000
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	400,000
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	260,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	515,000
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>2,660,972</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR (Dekon 03)</b>	<b>2,660,972</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	133,084
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	220,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	491,828
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	614,050
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	1,027,010
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	175,000
<b>Perikanan</b>	<b>575,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR (Dekon 13)</b>	<b>575,000</b>
Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	509,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	66,000
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>1,651,005</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR (Dekon 12)</b>	<b>1,651,005</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1,651,005
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>3,336,148</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR (Dekon 06)</b>	<b>3,336,148</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	392,040
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	812,592
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	174,246
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	750,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan	835,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	372,270
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>5,186,907</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR (Dekon 04)</b>	<b>5,186,907</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	1,700,000
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	862,770
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	205,160
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	1,082,777
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	826,010
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	510,190
<b>TP PROVINSI</b>	<b>10,690,378</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>7,734,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR (TP Provinsi 03)</b>	<b>7,734,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	4,500,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	234,000
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	3,000,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>905,285</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR (TP Provinsi 06)</b>	<b>905,285</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	350,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	500,000

Provinsi Jawa Timur

LOKASI/KEWENANGAN/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (000)
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	55,285
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>2,051,093</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR (TP Provinsi 04)</b>	<b>2,051,093</b>
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	1,205,890
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	845,203
<b>TP KAB./KOTA</b>	<b>51,666,843</b>
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>19,947,180</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PACITAN (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>902,240</b>
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	902,240
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BANGKALAN (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>926,030</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	926,030
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. GRESIK (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>776,530</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	776,530
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LAMONGAN (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>1,169,670</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	1,169,670
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MALANG (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>1,075,450</b>
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	1,075,450
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PAMEKASAN (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>3,194,610</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	3,194,610
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PROBOLINGGO (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>1,260,670</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	1,260,670
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TUBAN (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>741,530</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	741,530
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PASURUAN (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>714,030</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	714,030
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SAMPANG (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>3,194,610</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	3,194,610
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMENEP (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>4,144,610</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	4,144,610
<b>DINAS PERTANIAN KOTA SURABAYA (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>1,185,670</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	1,185,670
<b>DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PASURUAN (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>661,530</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	661,530
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>16,500,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TULUNGAGUNG (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>10,000,000</b>
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	10,000,000
<b>DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. SAMPANG (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>6,500,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	1,500,000
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	5,000,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>6,319,663</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BLITAR (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>688,394</b>
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	100,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	500,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	88,394
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. GRESIK (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>388,394</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	300,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	88,394
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TRENGGALEK (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>788,394</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	700,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	88,394
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TULUNG AGUNG (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>1,338,394</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	950,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	300,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	88,394
<b>DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA PROBOLINGGO (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>1,002,380</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	373,610
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	550,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	78,770
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. PROBOLINGGO (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>988,394</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	400,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	500,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	88,394

**Provinsi Jawa Timur**

LOKASI/KEWENANGAN/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN TUBAN (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>488,394</b>
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	400,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	88,394
<b>DINAS PERTANIAN KOTA SURABAYA (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>636,919</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	550,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	86,919
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>8,900,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	82,470
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	451,795
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	115,735
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BANYUWANGI (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	55,745
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	645,435
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	98,820
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BLITAR (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	56,429
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	471,521
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	122,050
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. GRESIK (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	32,040
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	65,790
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	607,210
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	94,960
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LAMONGAN (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	72,450
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	615,450
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	112,100
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PASURUAN (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	52,906
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	651,624
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	95,470
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SIDOARJO (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	38,780
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	65,295
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	603,250
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	92,675
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SITUBONDO (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	63,460
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	615,868
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	120,672
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUMENEP (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>550,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	62,350
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	381,900
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	105,750
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TUBAN (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	99,470
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	578,170
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	122,360
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TULUNGAGUNG (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	143,235
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	364,854
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	141,911
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. PROBOLINGGO (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	74,410

Provinsi Jawa Timur

LOKASI/KEWENANGAN/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (000)
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	601,030
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	124,560





**Provinsi Banten**

LOKASI/KEWENANGAN/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Banten</b>	<b>19,627,176</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>6,836,154</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>	<b>279,500</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN (Dekon 01)</b>	<b>279,500</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	279,500
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>671,244</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN (Dekon 05)</b>	<b>671,244</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	295,000
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	73,600
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	60,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	173,920
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	68,724
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,175,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN (Dekon 07)</b>	<b>1,175,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	170,000
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	355,000
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	235,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	415,000
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>1,550,959</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN (Dekon 03)</b>	<b>1,550,959</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	68,600
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan	220,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	326,367
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	340,050
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	445,942
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	150,000
<b>Perikanan</b>	<b>150,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN (Dekon 13)</b>	<b>150,000</b>
Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	114,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	36,000
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>596,750</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN (Dekon 12)</b>	<b>596,750</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	596,750
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,350,341</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN (Dekon 06)</b>	<b>1,350,341</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	228,750
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	387,803
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	155,880
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	215,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	362,908
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,062,360</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN (Dekon 04)</b>	<b>1,062,360</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	106,675
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	26,700
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	14,900
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	197,635
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	477,325
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	239,125
<b>TP PROVINSI</b>	<b>7,482,740</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>3,234,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN (TP Provinsi 03)</b>	<b>3,234,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan	3,000,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	234,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>2,666,100</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN (TP Provinsi 06)</b>	<b>2,666,100</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	2,200,000
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	300,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	100,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	66,100
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,582,640</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN (TP Provinsi 04)</b>	<b>1,582,640</b>
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	626,750
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	886,900

**Provinsi Banten**

LOKASI/KEWENANGAN/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (000)
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	68,990
<b>TP KAB./KOTA</b>	<b>5,308,282</b>
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,947,090</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LEBAK (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>1,061,650</b>
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	1,061,650
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN TANGERANG (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>885,440</b>
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	885,440
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>750,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PANDEGLANG (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>461,192</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PANDEGLANG (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>461,192</b>
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	400,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	61,192
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>2,150,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PANDEGLANG (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>550,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	67,070
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	376,868
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	106,062
<b>DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KAB. SERANG (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	42,340
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	84,600
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	568,010
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	105,050
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. TANGERANG (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	48,152
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	68,850
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	564,985
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	118,013

Provinsi DI Yogyakarta

LOKASI/KEWENANGAN/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>	<b>27,877,979</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>6,974,638</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>	<b>266,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA (Dekon 01)</b>	<b>266,000</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	266,000
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>624,806</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA (Dekon 05)</b>	<b>624,806</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	255,000
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	82,650
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	73,600
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	70,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	74,320
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	69,236
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,185,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA (Dekon 07)</b>	<b>1,185,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	164,000
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	339,010
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	189,500
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	492,490
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>1,446,226</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA (Dekon 03)</b>	<b>1,446,226</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	80,360
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	220,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	347,847
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	264,050
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	358,969
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	175,000
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>575,685</b>
<b>BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROVINSI DIY (Dekon 12)</b>	<b>575,685</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	575,685
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,413,046</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA (Dekon 06)</b>	<b>1,413,046</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	312,750
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	202,889
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	168,472
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	353,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan	75,360
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	300,575
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,463,875</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA (Dekon 04)</b>	<b>1,463,875</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	96,370
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	237,280
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	37,260
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	465,940
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	295,520
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	331,505
<b>TP PROVINSI</b>	<b>17,554,345</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>16,500,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA (TP Provinsi 03)</b>	<b>16,500,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	1,500,000
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	15,000,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>448,220</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA (TP Provinsi 06)</b>	<b>448,220</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	400,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	48,220
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>606,125</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA (TP Provinsi 04)</b>	<b>606,125</b>
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	241,155
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	299,950

**Provinsi DI Yogyakarta**

LOKASI/KEWENANGAN/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (000)
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	65,020
<b>TP KAB./KOTA</b>	<b>3,348,996</b>
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>895,280</b>
<b>DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. KULON PROGO (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>895,280</b>
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	895,280
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,153,716</b>
<b>DINAS KELAUTAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>576,858</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	200,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	300,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	76,858
<b>DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KAB. SLEMAN (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>576,858</b>
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	500,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	76,858
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,300,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GUNUNG KIDUL (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	60,900
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	70,680
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	418,270
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	100,150
<b>DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KAB. SLEMAN (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	74,855
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	471,700
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	103,445



Provinsi Bali

LOKASI/KEWENANGAN/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Bali</b>	<b>49,345,525</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>8,764,669</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>	<b>450,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI (Dekon 01)</b>	<b>450,000</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	450,000
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>589,434</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI (Dekon 05)</b>	<b>589,434</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	260,000
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	36,250
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	100,100
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	60,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	60,160
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	72,924
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,165,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI (Dekon 07)</b>	<b>1,165,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	180,000
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	360,000
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	195,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	430,000
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>1,522,120</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI (Dekon 03)</b>	<b>1,522,120</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	75,460
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan	220,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	314,490
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	204,050
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	533,120
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	175,000
<b>Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>	<b>278,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI (Dekon 13)</b>	<b>278,000</b>
Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	235,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	43,000
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>1,062,695</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI (Dekon 12)</b>	<b>1,062,695</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1,062,695
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>2,068,250</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI (Dekon 06)</b>	<b>2,068,250</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	297,850
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	729,658
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	376,892
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	253,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan	99,200
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	311,650
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,629,170</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI (Dekon 04)</b>	<b>1,629,170</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	191,530
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	136,890
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	61,540
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	471,480
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	356,060
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	411,670
<b>TP PROVINSI</b>	<b>11,549,550</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>10,734,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI (TP Provinsi 03)</b>	<b>10,734,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan	10,500,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	234,000
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	113,720
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI (TP Provinsi 06)</b>	<b>113,720</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	50,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	50,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	13,720
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>701,830</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI (TP Provinsi 04)</b>	<b>701,830</b>
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	701,830

Provinsi Bali

LOKASI/KEWENANGAN/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>TP KAB./KOTA</b>	<b>29,031,306</b>
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>2,962,020</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BADUNG (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>1,090,920</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	1,090,920
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BULELENG (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>832,730</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	832,730
<b>DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KARANGASEM (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>1,038,370</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	1,038,370
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>20,000,000</b>
<b>DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BADUNG (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>20,000,000</b>
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	20,000,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>3,569,286</b>
<b>DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KARANGASEM (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>585,482</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	500,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	85,482
<b>DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. KLUNGKUNG (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>585,482</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	500,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	85,482
<b>DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BADUNG (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>2,398,322</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	2,300,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	98,322
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>2,500,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN TABANAN (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	72,160
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	460,400
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	117,440
<b>DINAS PETERNAKAN PERIKANAN KAB. BANGLI (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	34,000
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	60,659
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	444,721
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	110,620
<b>DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KARANGASEM (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	542,120
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	107,880
<b>DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. KLUNGKUNG (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>550,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	68,460
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	381,650
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	99,890

**Provinsi Nusa Tenggara Barat**

LOKASI/KEWENANGAN/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>	<b>51,752,252</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>10,751,917</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>	<b>250,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT (Dekon 01)</b>	<b>250,000</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	250,000
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>909,460</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT (Dekon 05)</b>	<b>909,460</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	355,000
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	72,500
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	100,100
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	90,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	179,558
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	112,302
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>2,162,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT (Dekon 07)</b>	<b>2,162,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	300,000
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	497,000
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	400,000
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	250,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	715,000
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>1,913,007</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT (Dekon 03)</b>	<b>1,913,007</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	85,064
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan	220,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	410,579
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	315,000
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	707,364
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	175,000
<b>Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>	<b>180,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT (Dekon 13)</b>	<b>180,000</b>
Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	135,750
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	44,250
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>1,169,780</b>
<b>BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (Dekon 12)</b>	<b>1,169,780</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1,169,780
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,792,342</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (Dekon 06)</b>	<b>1,792,342</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	295,350
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	361,532
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	436,380
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	250,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan	80,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	369,080
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>2,375,328</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (Dekon 04)</b>	<b>2,375,328</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	958,870
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	222,185
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	117,475
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	413,500
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	267,475
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	395,823
<b>TP PROVINSI</b>	<b>5,080,922</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>3,234,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (TP Provinsi 03)</b>	<b>3,234,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan	3,000,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	234,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>903,250</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (TP Provinsi 06)</b>	<b>903,250</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	500,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	350,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	53,250

Provinsi Nusa Tenggara Barat

LOKASI/KEWENANGAN/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>943,672</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT (TP Provinsi 04)</b>	<b>943,672</b>
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	369,500
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	574,172
<b>TP KAB./KOTA</b>	<b>35,919,413</b>
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>14,838,180</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BIMA (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>774,030</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	774,030
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB BIMA (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>3,291,440</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	3,291,440
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LOMBOK BARAT (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>7,521,240</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	7,521,240
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LOMBOK TENGAH (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>1,166,370</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	1,166,370
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LOMBOK TIMUR (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>1,166,870</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	1,166,870
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUMBAWA (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>918,230</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	918,230
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>11,500,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LOMBOK BARAT (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LOMBOK TENGAH (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>10,750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	10,000,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>6,581,233</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB BIMA (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>2,058,238</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	1,950,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	108,238
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB DOMPU (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>591,760</b>
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	503,900
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	87,860
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB LOMBOK TIMUR (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>1,248,240</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	900,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	250,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	98,240
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LOMBOK BARAT (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>591,760</b>
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	500,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	91,760
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LOMBOK TENGAH (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>1,498,240</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	1,400,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	98,240
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BIMA (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>592,995</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	494,085
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	98,910
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>3,000,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB LOMBOK TIMUR (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>550,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	71,384
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	359,525
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	119,091
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMA (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>550,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	53,125
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	335,200
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	161,675
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LOMBOK TENGAH (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	84,199
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	594,800
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	121,001
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUMBAWA (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>550,000</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	40,140
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	88,070



Provinsi Nusa Tenggara Barat

LOKASI/KEWENANGAN/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (000)
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	282,060
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	139,730
<b>DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. SUMBAWA BARAT (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>550,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	71,495
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	376,160
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	102,345



**Provinsi Nusa Tenggara Timur**

LOKASI/KEWENANGAN/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>39,133,883</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>11,058,730</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>	<b>250,500</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR (Dekon 01)</b>	<b>250,500</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	250,500
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>753,558</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR (Dekon 05)</b>	<b>753,558</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	265,000
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	82,650
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	100,100
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	70,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	124,280
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	111,528
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,787,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR (Dekon 07)</b>	<b>1,787,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	300,000
Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	194,000
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	447,000
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	184,000
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	255,800
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	406,200
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>2,338,878</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR (Dekon 03)</b>	<b>2,338,878</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	127,596
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan	220,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	566,490
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	329,050
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	920,742
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	175,000
<b>Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>	<b>246,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR (Dekon 13)</b>	<b>246,000</b>
Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	197,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	49,000
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>1,059,745</b>
<b>BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (Dekon 12)</b>	<b>1,059,745</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1,059,745
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,718,703</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR (Dekon 06)</b>	<b>1,718,703</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	302,300
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	301,877
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	337,426
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	260,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan	86,100
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	431,000
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>2,904,346</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR (Dekon 04)</b>	<b>2,904,346</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	328,925
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	432,750
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	387,020
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	743,635
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	427,540
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	584,476
<b>TP PROVINSI</b>	<b>1,662,874</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>234,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR (TP Provinsi 03)</b>	<b>234,000</b>
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	234,000

**Provinsi Nusa Tenggara Timur**

LOKASI/KEWENANGAN/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>448,220</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR (TP Provinsi 06)</b>	<b>448,220</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	100,000
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	200,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	100,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	48,220
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>980,654</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR (TP Provinsi 04)</b>	<b>980,654</b>
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	704,000
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	198,774
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	77,880
<b>TP KAB./KOTA</b>	<b>26,412,279</b>
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>14,704,140</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB ALOR (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>781,840</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	781,840
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. ENDE (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>811,230</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	811,230
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KUPANG (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>891,230</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	891,230
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. NAGEKEO (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>1,084,870</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	1,084,870
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUMBA TIMUR (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>915,230</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	915,230
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TIMOR TENGAH UTARA (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>975,230</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	975,230
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SIKKA (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>2,103,770</b>
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	1,103,770
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	1,000,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA KUPANG (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>6,358,010</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	6,358,010
<b>DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MANGGARAI (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>782,730</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	782,730
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>6,000,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BELU (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>3,000,000</b>
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	3,000,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. FLORES TIMUR (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KUPANG (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SIKKA (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA KUPANG (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>3,008,139</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MANGGARAI BARAT (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>727,416</b>
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	600,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	127,416
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SIKKA (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>1,684,513</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	1,510,920
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	173,593
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA KUPANG (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>596,210</b>
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	500,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	96,210
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>2,700,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LEMBATA (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>675,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	75,100
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	453,880
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	146,020

**Provinsi Nusa Tenggara Timur**

LOKASI/KEWENANGAN/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. ROTE NDAO (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>675,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	96,200
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	443,902
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	134,898
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SIKKA (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>675,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	48,290
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	502,230
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	124,480
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUMBA TIMUR (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>675,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	72,650
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	443,800
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	158,550



Provinsi Aceh

LOKASI/KEWENANGAN/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Aceh</b>	<b>45,485,853</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>9,875,146</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>	<b>250,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (Dekon 01)</b>	<b>250,000</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	250,000
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>527,020</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (Dekon 05)</b>	<b>527,020</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	210,000
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	84,100
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	40,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	70,920
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	122,000
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,762,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (Dekon 07)</b>	<b>1,762,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	200,000
Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	300,000
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	147,000
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	600,000
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	150,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	365,000
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>2,405,277</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (Dekon 03)</b>	<b>2,405,277</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	118,678
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan	270,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	471,535
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	456,050
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	914,014
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	175,000
<b>Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>	<b>145,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (Dekon 13)</b>	<b>145,000</b>
Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	97,380
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	47,620
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>1,185,895</b>
<b>BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROVINSI ACEH (Dekon 12)</b>	<b>1,185,895</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1,185,895
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,408,454</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (Dekon 06)</b>	<b>1,408,454</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	350,405
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	403,571
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	130,478
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	210,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	314,000
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>2,191,500</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (Dekon 04)</b>	<b>2,191,500</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	213,395
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	26,900
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	775,965
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	394,775
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	542,735
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	237,730

**Provinsi Aceh**

LOKASI/KEWENANGAN/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>TP PROVINSI</b>	<b>18,744,240</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>16,234,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (TP Provinsi 03)</b>	<b>16,234,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	12,000,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	234,000
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	4,000,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>2,159,740</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (TP Provinsi 06)</b>	<b>2,159,740</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	700,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	1,400,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	59,740
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>350,500</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (TP Provinsi 04)</b>	<b>350,500</b>
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	350,500
<b>TP KAB./KOTA</b>	<b>16,866,467</b>
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>3,406,350</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH TIMUR (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>698,275</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	698,275
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH UTARA (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>692,775</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	692,775
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. ACEH BESAR (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>908,725</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	908,725
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PIDIE (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>1,106,575</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	1,106,575
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>4,500,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH SELATAN (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SIMEULUE (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. ACEH BESAR (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. ACEH SINGKIL (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. ACEH TIMUR (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>DINAS SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. ACEH BARAT DAYA (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>6,060,117</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH SELATAN (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>2,611,602</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	2,500,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	111,602
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. ACEH TIMUR (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>2,855,455</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	2,200,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	550,100
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	105,355
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SIMEULEU (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>593,060</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	500,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	93,060
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>2,900,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIREUN (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	53,480
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	113,890
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	485,080
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	147,550

Provinsi Aceh

LOKASI/KEWENANGAN/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. ACEH SELATAN (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	71,650
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	423,450
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	154,900
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. ACEH TIMUR (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	98,570
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	572,430
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	129,000
<b>DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH TENGGARA (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	41,517
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	487,398
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	121,085



Provinsi Sumatera Utara

LOKASI/KEWENANGAN/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Sumatera Utara</b>	<b>24,405,273</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>9,330,079</b>
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	250,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA (Dekon 01)</b>	<b>250,000</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	250,000
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>622,313</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA (Dekon 05)</b>	<b>622,313</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	270,000
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	84,100
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	80,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	81,760
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	106,453
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,190,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA (Dekon 07)</b>	<b>1,190,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	100,000
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	144,100
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	390,900
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	175,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	380,000
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>1,880,157</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA (Dekon 03)</b>	<b>1,880,157</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	132,678
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan	220,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	478,102
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	190,000
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	684,377
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	175,000
<b>Perikanan</b>	<b>324,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA (Dekon 13)</b>	<b>324,000</b>
Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	282,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	42,000
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>701,800</b>
<b>BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI SUMATERA UTARA (Dekon 12)</b>	<b>701,800</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	701,800
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,766,984</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA (Dekon 06)</b>	<b>1,766,984</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	206,100
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	447,132
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	259,462
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	325,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan	147,700
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	381,590
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>2,594,825</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA (Dekon 04)</b>	<b>2,594,825</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	732,900
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	227,940
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	93,480
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	770,275
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	327,030
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	443,200
<b>TP PROVINSI</b>	<b>3,677,435</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>500,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA (TP Provinsi 03)</b>	<b>500,000</b>
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	500,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,553,260</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA (TP Provinsi 06)</b>	<b>1,553,260</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	800,000
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	400,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	300,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	53,260
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,624,175</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA (TP Provinsi 04)</b>	<b>1,624,175</b>
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	864,015



**Provinsi Sumatera Utara**

LOKASI/KEWENANGAN/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (000)
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	675,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	85,160
<b>TP KAB./KOTA</b>	<b>11,397,759</b>
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>2,907,160</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.TAPANULI TENGAH (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>1,000,000</b>
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	1,000,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NIAS UTARA (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>1,000,000</b>
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	1,000,000
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. ASAHAN (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>907,160</b>
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	907,160
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>2,250,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.TAPANULI TENGAH (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BATUBARA (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. LANGKAT (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>4,940,599</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BATUBARA (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>1,550,515</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	1,450,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	100,515
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.TAPANULI TENGAH (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>594,748</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	500,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	94,748
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. LANGKAT (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>819,035</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	425,000
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	300,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	94,035
<b>DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. TAPANULI UTARA (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>644,035</b>
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	550,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	94,035
<b>DINAS PERTANIAN DAN KELAUTAN KOTA MEDAN (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>637,518</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	544,120
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	93,398
<b>DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KOTA PEMATANGSIANTAR (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>694,748</b>
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	600,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	94,748
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,300,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. SERDANG BEDAGAI (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	66,460
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	465,100
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	118,440
<b>DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. TAPANULI UTARA (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	544,425
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	105,575

**Provinsi Sumatera Barat**

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Sumatera Barat</b>	<b>19,133,018</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>8,957,894</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>	<b>250,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT (Dekon 01)</b>	<b>250,000</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	250,000
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>732,074</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT (Dekon 05)</b>	<b>732,074</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	260,000
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	82,650
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	84,100
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	90,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	144,480
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	70,844
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,500,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT (Dekon 07)</b>	<b>1,500,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	200,000
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	200,000
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	585,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	515,000
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>1,683,881</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT (Dekon 03)</b>	<b>1,683,881</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	109,074
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	220,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	376,487
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	240,000
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	563,320
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	175,000
<b>Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>	<b>149,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT (Dekon 13)</b>	<b>149,000</b>
Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	109,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	40,000
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>915,080</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT (Dekon 12)</b>	<b>915,080</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	915,080
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,762,609</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT (Dekon 06)</b>	<b>1,762,609</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	349,325
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	411,492
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	256,108
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	340,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan	75,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	330,684
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,965,250</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT (Dekon 04)</b>	<b>1,965,250</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	120,210
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	142,800
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	76,275
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	583,125
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	519,150
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	523,690
<b>TP PROVINSI</b>	<b>4,843,144</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>3,000,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT (TP Provinsi 03)</b>	<b>3,000,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	1,000,000
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2,000,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>853,394</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT (TP Provinsi 06)</b>	<b>853,394</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	100,000
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	600,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	100,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	53,394

Provinsi Sumatera Barat

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>989,750</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT (TP Provinsi 04)</b>	<b>989,750</b>
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	280,750
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	709,000
<b>TP KAB./KOTA</b>	<b>5,331,980</b>
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,906,080</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PESISIR SELATAN (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>906,080</b>
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	906,080
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>1,000,000</b>
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	1,000,000
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>750,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PADANG (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>575,900</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PADANG (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>575,900</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	395,620
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	100,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	80,280
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>2,100,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. AGAM (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	64,320
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	55,680
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	390,690
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	139,310
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PESISIR SELATAN (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	74,870
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	597,920
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	127,210
<b>DINAS PERTANIAN KAB. PASAMAN (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	49,400
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	462,350
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	138,250

Provinsi Riau

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Riau</b>	<b>16,573,478</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>8,130,717</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>	<b>300,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU (Dekon 01)</b>	<b>300,000</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	300,000
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>566,970</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU (Dekon 05)</b>	<b>566,970</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	265,000
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	73,600
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	80,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	79,000
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	69,370
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,590,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU (Dekon 07)</b>	<b>1,590,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	200,000
Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	275,000
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	150,000
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	200,000
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	300,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	465,000
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>1,909,293</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU (Dekon 03)</b>	<b>1,909,293</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	72,716
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	220,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	543,018
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	240,000
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	658,559
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	175,000
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>719,095</b>
<b>SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI RIAU (Dekon 12)</b>	<b>719,095</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	719,095
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,251,934</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU (Dekon 06)</b>	<b>1,251,934</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	225,740
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	314,970
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	119,044
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	230,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan	75,260
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	286,920
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,793,425</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU (Dekon 04)</b>	<b>1,793,425</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	173,500
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	241,650
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	319,000
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	331,950
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	311,500
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	415,825
<b>TP PROVINSI</b>	<b>4,202,795</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>3,234,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU (TP Provinsi 03)</b>	<b>3,234,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	3,000,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	234,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>448,220</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU (TP Provinsi 06)</b>	<b>448,220</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	50,000
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	200,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	150,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	48,220
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>520,575</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU (TP Provinsi 04)</b>	<b>520,575</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	62,775
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	457,800

**Provinsi Riau**

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>TP KAB./KOTA</b>	<b>4,239,966</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>1,500,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>789,966</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. INDRAGIRI HILIR (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>789,966</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	100,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	600,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	89,966
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,950,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. PELALAWAN (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	64,350
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	426,300
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	159,350
<b>DINAS PERIKANAN KAB. KAMPAR (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	47,335
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	465,355
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	137,310
<b>DINAS PERIKANAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	69,035
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	301,895
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	279,070

Provinsi Lampung

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>26,264,235</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>9,023,749</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>	<b>300,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG (Dekon 01)</b>	<b>300,000</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	300,000
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>677,188</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG (Dekon 05)</b>	<b>677,188</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	270,000
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	100,100
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	90,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	150,706
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	66,382
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,162,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG (Dekon 07)</b>	<b>1,162,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	141,570
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	296,094
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	300,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	424,336
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>1,414,659</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG (Dekon 03)</b>	<b>1,414,659</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	78,204
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan	220,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	212,684
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	264,050
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	464,721
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	175,000
<b>Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>	<b>254,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG (Dekon 13)</b>	<b>254,000</b>
Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	213,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	41,000
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>700,550</b>
<b>BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI LAMPUNG (Dekon 12)</b>	<b>700,550</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	700,550
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,887,532</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG (Dekon 06)</b>	<b>1,887,532</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	289,150
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	589,897
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	338,095
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	245,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan	90,800
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	334,590
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>2,627,820</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG (Dekon 04)</b>	<b>2,627,820</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	780,150
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	52,538
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	155,270
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	720,170
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	510,172
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	409,520
<b>TP PROVINSI</b>	<b>5,850,440</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>4,234,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG (TP Provinsi 03)</b>	<b>4,234,000</b>
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	234,000
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	4,000,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>903,260</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG (TP Provinsi 06)</b>	<b>903,260</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	350,000
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	400,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	100,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	53,260
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>713,180</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG (TP Provinsi 04)</b>	<b>713,180</b>
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	471,200

**Provinsi Lampung**

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	191,500
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	50,480
<b>TP KAB/KOTA</b>	<b>11,390,046</b>
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,063,450</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TANGGAMUS (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>1,063,450</b>
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	1,063,450
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>5,500,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TANGGAMUS (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>4,000,000</b>
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	4,000,000
<b>DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN KAB. PESISIR BARAT (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>1,500,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	1,500,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,776,596</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TANGGAMUS (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>888,298</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	300,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	500,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	88,298
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>888,298</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	800,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	88,298
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>3,050,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LAMPUNG SELATAN (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	686,770
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	113,230
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LAMPUNG TIMUR (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	695,430
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	104,570
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PESAWARAN (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	46,890
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	70,120
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	416,550
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	116,440
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TULANG BAWANG (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	54,000
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	56,595
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	562,285
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	127,120

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Bangka Belitung</b>	<b>9,556,835</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>6,715,867</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>	<b>250,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (Dekon 01)</b>	<b>250,000</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	250,000
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>453,479</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (Dekon 05)</b>	<b>453,479</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	150,000
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	73,600
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	40,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	121,509
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	68,370
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,175,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (Dekon 07)</b>	<b>1,175,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	93,000
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	381,500
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	289,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	411,500
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>1,705,410</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (Dekon 03)</b>	<b>1,705,410</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	72,716
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan	220,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	345,510
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	240,000
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	652,184
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	175,000
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>331,870</b>
<b>BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (Dekon 12)</b>	<b>331,870</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	331,870
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,274,628</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (Dekon 06)</b>	<b>1,274,628</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	272,850
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	341,992
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	212,346
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	160,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	287,440
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,525,480</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (Dekon 04)</b>	<b>1,525,480</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	155,675
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	299,465
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	154,280
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	392,078
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	242,280
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	281,702
<b>TP PROVINSI</b>	<b>699,220</b>
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>128,700</b>
<b>06)</b>	<b>128,700</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	50,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	50,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	28,700
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>570,520</b>
<b>04)</b>	<b>570,520</b>
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	238,000
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	244,540
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	87,980
<b>TP KAB./KOTA</b>	<b>2,141,748</b>
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,491,748</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>1,491,748</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	1,400,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	91,748
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>650,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BANGKA SELATAN (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	94,020



# Digital Repository Universitas Jember

Provinsi Bangka Belitung

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	435,858
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	120,122

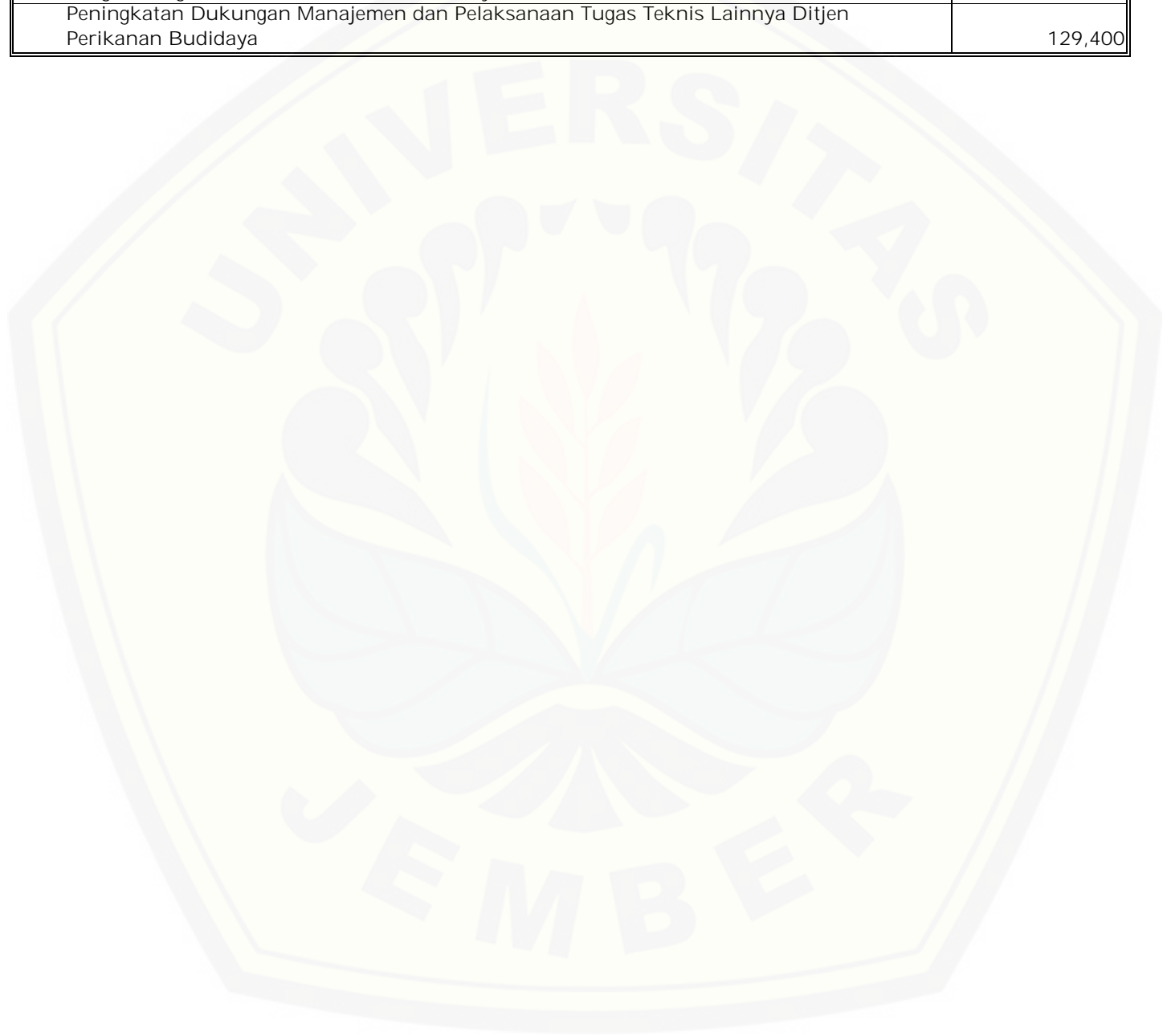


Provinsi Bengkulu

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Bengkulu</b>	<b>19,672,332</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>6,373,086</b>
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	350,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU (Dekon 01)</b>	<b>350,000</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	350,000
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	<b>665,190</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU (Dekon 05)</b>	<b>665,190</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	270,000
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	73,600
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	80,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	174,640
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	66,950
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<b>815,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU (Dekon 07)</b>	<b>815,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	150,000
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	200,000
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	100,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	365,000
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	<b>1,615,459</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU (Dekon 03)</b>	<b>1,615,459</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	72,716
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	170,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	366,390
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	295,000
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	561,353
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	150,000
Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	<b>726,840</b>
<b>SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI BENGKULU (Dekon 12)</b>	<b>726,840</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	726,840
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	<b>1,097,552</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU (Dekon 06)</b>	<b>1,097,552</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	255,000
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	131,510
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	116,174
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	230,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	364,868
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	<b>1,103,045</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU (Dekon 04)</b>	<b>1,103,045</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	94,520
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	13,900
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	499,880
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	201,670
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	293,075
<b>TP PROVINSI</b>	<b>9,534,895</b>
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	<b>8,234,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU (TP Provinsi 03)</b>	<b>8,234,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	4,500,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	234,000
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	3,500,000
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	<b>292,940</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU (TP Provinsi 06)</b>	<b>292,940</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	100,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	150,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	42,940
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	<b>1,007,955</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU (TP Provinsi 04)</b>	<b>1,007,955</b>
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	607,955
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	400,000

**Provinsi Bengkulu**

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>TP KAB/KOTA</b>	<b>3,764,351</b>
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>901,280</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KAUR (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>901,280</b>
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	901,280
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>2,013,071</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BENGKULU (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>1,533,071</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	1,450,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	83,071
<b>DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KELAUTAN KAB. BENGKULU TENGAH (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>480,000</b>
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	400,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	80,000
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>850,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BENGKULU UTARA (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>850,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	39,200
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	681,400
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	129,400



**Provinsi Jambi**

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Jambi</b>	<b>17,139,245</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>8,214,670</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>	<b>300,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI (Dekon 01)</b>	<b>300,000</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	300,000
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>596,420</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI (Dekon 05)</b>	<b>596,420</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	270,000
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	73,600
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	80,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	103,120
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	69,700
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,085,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI (Dekon 07)</b>	<b>1,085,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	100,000
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	365,900
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	120,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	499,100
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>1,776,507</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI (Dekon 03)</b>	<b>1,776,507</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	81,340
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan	220,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	565,966
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	335,000
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	424,201
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	150,000
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>685,240</b>
<b>BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI JAMBI (Dekon 12)</b>	<b>685,240</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	685,240
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,422,858</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI (Dekon 06)</b>	<b>1,422,858</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	289,420
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	270,103
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	247,100
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	290,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	326,235
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>2,348,645</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI (Dekon 04)</b>	<b>2,348,645</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	207,965
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	418,080
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	175,030
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	567,284
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	401,581
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	578,705
<b>TP-PROVINSI</b>	<b>6,974,575</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>6,000,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI (TP Provinsi 03)</b>	<b>6,000,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan	6,000,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>418,220</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI (TP Provinsi 06)</b>	<b>418,220</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	270,000
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	100,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	48,220
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>556,355</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI (TP Provinsi 04)</b>	<b>556,355</b>
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	447,205
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	109,150
<b>TP KAB/KOTA</b>	<b>1,950,000</b>
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,950,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. MUARO JAMBI (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	90,488

Provinsi Jambi

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	428,022
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	131,490
<b>DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KOTA JAMBI (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	45,720
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	43,905
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	436,875
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	123,500
<b>DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. BATANGHARI (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	53,057
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	452,503
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	144,440



Provinsi Sumatera Selatan

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Sumatera Selatan</b>	<b>16,749,724</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>7,795,166</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>	<b>200,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN (Dekon 01)</b>	<b>200,000</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	200,000
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>620,350</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN (Dekon 05)</b>	<b>620,350</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	290,000
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	73,600
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	90,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	100,100
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	66,650
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>915,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN (Dekon 07)</b>	<b>915,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	200,000
Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200,000
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	100,000
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	50,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	365,000
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>1,579,753</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN (Dekon 03)</b>	<b>1,579,753</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	78,400
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan	220,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	474,636
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	260,000
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	371,717
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	175,000
<b>Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>	<b>161,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN (Dekon 13)</b>	<b>161,000</b>
Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	122,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	39,000
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>886,380</b>
<b>BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN (Dekon 12)</b>	<b>886,380</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	886,380
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,383,737</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN (Dekon 06)</b>	<b>1,383,737</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	294,175
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	335,539
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	166,842
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	270,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	317,181
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>2,048,946</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN (Dekon 04)</b>	<b>2,048,946</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	341,850
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	323,260
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	161,833
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	524,980
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	287,430
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	409,593
<b>TP PROVINSI</b>	<b>1,767,054</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>234,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN (TP Provinsi 03)</b>	<b>234,000</b>
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	234,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>100,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN (TP Provinsi 06)</b>	<b>100,000</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	50,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	50,000

**Provinsi Sumatera Selatan**

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,433,054</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN (TP Provinsi 04)</b>	<b>1,433,054</b>
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	582,700
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	850,354
<b>TP KAB/KOTA</b>	<b>7,187,504</b>
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,987,504</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MUSI BANYUASIN (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>976,918</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	900,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	76,918
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PALEMBANG (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>375,048</b>
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	300,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	75,048
<b>DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. OGAN ILIR (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>635,538</b>
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	550,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	85,538
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>5,200,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. OGAN KOMERING ILIR (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	95,650
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	418,090
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	136,260
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BANYUASIN (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	82,628
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	458,606
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	108,766
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. MUSI BANYUASIN (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	64,028
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	481,222
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	104,750
<b>DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. OGAN ILIR (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	81,410
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	454,940
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	113,650
<b>DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. OKU SELATAN (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	84,960
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	436,940
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	128,100
<b>DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. OKU TIMUR (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	76,179
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	464,553
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	109,268
<b>DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KELAUTAN KOTA PALEMBANG (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	44,015
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	44,624
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	441,600
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	119,761
<b>DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUSI RAWAS (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	38,970
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	67,070
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	412,580
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	131,380

**Provinsi Kalimantan Selatan**

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>	<b>25,480,621</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>9,811,792</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>	<b>300,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (Dekon 01)</b>	<b>300,000</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	300,000
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>639,048</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (Dekon 05)</b>	<b>639,048</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	260,000
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	56,050
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	73,670
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	80,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	70,080
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	99,248
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,565,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (Dekon 07)</b>	<b>1,565,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	96,750
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	467,000
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	200,000
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	230,550
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	570,700
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>1,956,839</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (Dekon 03)</b>	<b>1,956,839</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	95,060
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	220,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	532,639
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	420,000
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	539,140
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	150,000
<b>Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>	<b>193,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (Dekon 13)</b>	<b>193,000</b>
Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	153,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	40,000
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>1,323,230</b>
<b>BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (Dekon 12)</b>	<b>1,323,230</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1,323,230
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,588,320</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (Dekon 06)</b>	<b>1,588,320</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	302,850
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	572,010
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	122,560
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	220,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	370,900
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>2,246,355</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (Dekon 04)</b>	<b>2,246,355</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	268,725
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	213,525
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	175,900
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	562,825
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	539,850
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	485,530
<b>TP PROVINSI</b>	<b>4,625,905</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>3,000,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (TP Provinsi 03)</b>	<b>3,000,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	3,000,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>848,260</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (TP Provinsi 06)</b>	<b>848,260</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	200,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	600,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	48,260



**Provinsi Kalimantan Selatan**

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>777,645</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (TP Provinsi 04)</b>	<b>777,645</b>
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	407,700
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	292,750
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	77,195
<b>TP KAB./KOTA</b>	<b>11,042,924</b>
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>905,960</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BANJAR (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>905,960</b>
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	905,960
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>6,500,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.TANAH LAUT (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BARITO KUALA (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>5,750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	5,000,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,686,964</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TANAH BUMBU (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>996,674</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	900,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	96,674
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TANAH LAUT (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>690,290</b>
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	600,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	90,290
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,950,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HULU SUNGAI UTARA (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	60,741
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	487,155
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	102,104
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BANJAR (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	43,800
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	77,100
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	397,320
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	131,780
<b>DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	112,473
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	433,027
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	104,500

Provinsi Kalimantan Barat

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>25,034,143</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>8,684,952</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>	<b>350,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT (Dekon 01)</b>	<b>350,000</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	350,000
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>870,498</b>
<b>DINAS KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT (Dekon 05)</b>	<b>870,498</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	449,000
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	36,250
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	84,100
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	80,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	150,000
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	71,148
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,322,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT (Dekon 07)</b>	<b>1,322,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	150,000
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	447,000
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	200,000
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	160,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	365,000
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>1,755,544</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT (Dekon 03)</b>	<b>1,755,544</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	107,800
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan	220,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	401,422
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	279,050
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	572,272
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	175,000
<b>Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>	<b>193,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT (Dekon 13)</b>	<b>193,000</b>
Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	143,300
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	49,700
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>909,320</b>
<b>BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT (Dekon 12)</b>	<b>909,320</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	909,320
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,476,140</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT (Dekon 06)</b>	<b>1,476,140</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	301,150
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	330,976
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	261,884
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	250,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	332,130
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,808,450</b>
<b>DINAS KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT (Dekon 04)</b>	<b>1,808,450</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	344,350
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	184,700
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	96,450
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	395,100
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	557,150
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	230,700
<b>TP PROVINSI</b>	<b>3,632,610</b>
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>2,300,060</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT (TP Provinsi 06)</b>	<b>2,300,060</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	1,296,800
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	100,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	850,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	53,260
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,332,550</b>
<b>DINAS KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT (TP Provinsi 04)</b>	<b>1,332,550</b>
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	268,640
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	959,210

**Provinsi Kalimantan Barat**

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	104,700
<b>TP KAB./KOTA</b>	<b>12,716,581</b>
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>6,161,167</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KUBU RAYA (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>5,257,607</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	5,257,607
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PONTIANAK (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>903,560</b>
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	903,560
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>5,755,414</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>2,338,701</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	2,250,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	88,701
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BENGKAYANG (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>2,388,701</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	2,300,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	88,701
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA SINGKAWANG (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>389,006</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	300,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	89,006
<b>DINAS PERIKANAN KAB. KAPUAS HULU (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>639,006</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	550,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	89,006
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>800,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SAMPAS (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	76,204
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	598,110
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	125,686

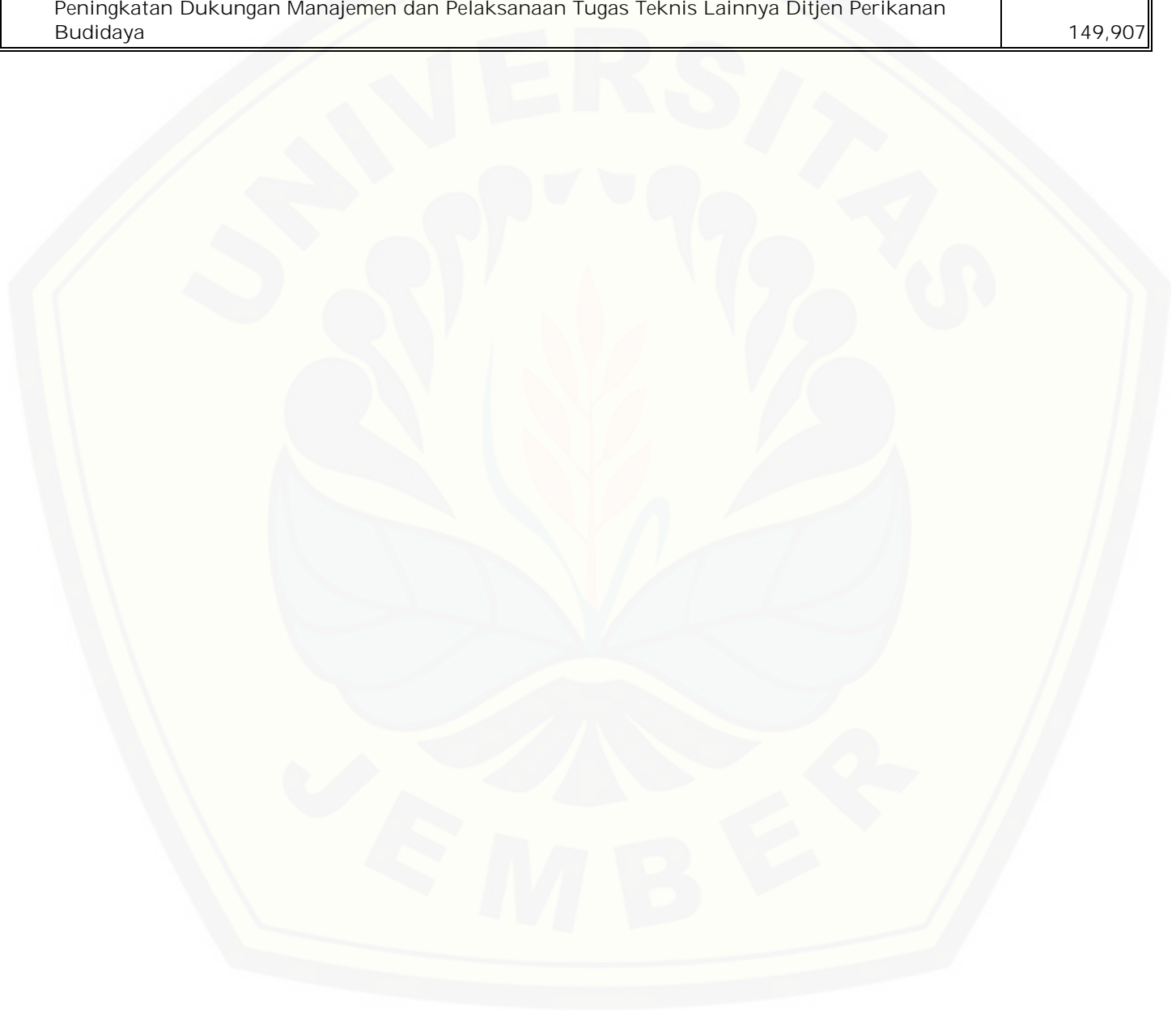


Provinsi Kalimantan Tengah

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>	<b>15,958,562</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>7,818,424</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>	<b>300,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (Dekon 01)</b>	<b>300,000</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	300,000
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>512,660</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (Dekon 05)</b>	<b>512,660</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	260,000
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	73,600
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	60,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	48,320
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	70,740
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,265,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (Dekon 07)</b>	<b>1,265,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	100,000
Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200,000
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	100,000
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	200,000
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	200,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	465,000
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>1,748,421</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (Dekon 03)</b>	<b>1,748,421</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	72,660
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	220,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	524,544
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	210,000
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	546,217
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	175,000
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>864,370</b>
<b>BADAN KETAHANAN PANGAN DAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (Dekon 12)</b>	<b>864,370</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	864,370
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,161,768</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (Dekon 06)</b>	<b>1,161,768</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	228,900
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	291,772
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	123,446
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	185,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	332,650
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,966,205</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (Dekon 04)</b>	<b>1,966,205</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	211,560
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	270,600
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	247,395
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	473,299
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	440,540
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	322,811
<b>TP PROVINSI</b>	<b>4,155,795</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>3,234,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (TP Provinsi 03)</b>	<b>3,234,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	3,000,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	234,000
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>921,795</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (TP Provinsi 04)</b>	<b>921,795</b>
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	208,410
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	670,305
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	43,080
<b>TP KAB./KOTA</b>	<b>3,984,343</b>
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>904,280</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KOTAWARINGIN BARAT (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>904,280</b>
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	904,280

Provinsi Kalimantan Tengah

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>750,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,680,063</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>583,389</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	500,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	83,389
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KOTAWARINGIN BARAT (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>1,096,674</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	500,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	500,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	96,674
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>650,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KAPUAS (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	72,698
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	92,605
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	334,790
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	149,907



Provinsi Kalimantan Timur

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>	<b>18,198,601</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>8,671,796</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>	<b>300,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Dekon 01)</b>	<b>300,000</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Movev Pembangunan KKP	300,000
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>679,680</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Dekon 05)</b>	<b>679,680</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	260,000
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	36,250
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	84,100
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	80,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	147,200
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	72,130
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,265,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Dekon 07)</b>	<b>1,265,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	150,000
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	500,000
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	150,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	465,000
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>1,826,182</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Dekon 03)</b>	<b>1,826,182</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	98,784
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	220,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	416,738
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	340,000
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	575,660
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	175,000
<b>Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>	<b>431,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Dekon 13)</b>	<b>431,000</b>
Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	356,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	75,000
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>784,970</b>
<b>BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Dekon 12)</b>	<b>784,970</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	784,970
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,555,796</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Dekon 06)</b>	<b>1,555,796</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	210,500
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	526,118
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	181,068
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	205,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan	85,700
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	347,410
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,829,168</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Dekon 04)</b>	<b>1,829,168</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	464,540
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	98,480
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	143,248
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	647,170
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	255,470
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	220,260
<b>TP PROVINSI</b>	<b>1,813,772</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>234,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (TP Provinsi 03)</b>	<b>234,000</b>
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	234,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>242,940</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (TP Provinsi 06)</b>	<b>242,940</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	100,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	100,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	42,940
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,336,832</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (TP Provinsi 04)</b>	<b>1,336,832</b>
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	664,450

Provinsi Kalimantan Timur

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	465,382
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	207,000
<b>TP KAB./KOTA</b>	<b>7,713,033</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>3,000,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BERAU (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NUNUKAN (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PASER (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BULUNGAN (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>3,363,033</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KUTAI TIMUR (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>909,158</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	800,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	109,158
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. NUNUKAN (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>2,453,875</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	2,300,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	153,875
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,350,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KUTAI KERTANEGARA (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	85,650
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	623,755
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	90,595
<b>DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. PENAJAM PASER UTARA (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>550,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	100,654
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	326,342
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	123,004

Provinsi Sulawesi Barat

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Sulawesi Barat</b>	<b>15,829,165</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>7,148,763</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>	<b>250,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT (Dekon 01)</b>	<b>250,000</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	250,000
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>652,648</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT (Dekon 05)</b>	<b>652,648</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	275,000
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	73,600
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	90,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	122,160
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	91,888
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,315,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT (Dekon 07)</b>	<b>1,315,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	150,000
Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200,000
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	389,100
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	95,325
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	480,575
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>1,550,146</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT (Dekon 03)</b>	<b>1,550,146</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	76,412
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	220,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	337,984
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	274,050
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	466,700
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	175,000
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>502,430</b>
<b>BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI SULAWESI BARAT (Dekon 12)</b>	<b>502,430</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	502,430
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,203,009</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT (Dekon 06)</b>	<b>1,203,009</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	261,000
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	200,451
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	130,198
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	280,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	331,360
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,675,530</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT (Dekon 04)</b>	<b>1,675,530</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	242,915
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	60,000
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	154,195
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	523,550
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	215,515
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	479,355
<b>TP PROVINSI</b>	<b>4,435,410</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>3,234,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT (TP Provinsi 03)</b>	<b>3,234,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	3,000,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	234,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>292,940</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT (TP Provinsi 06)</b>	<b>292,940</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	150,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	100,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	42,940
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>908,470</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT (TP Provinsi 04)</b>	<b>908,470</b>
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	311,000
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	540,110
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	57,360



**Provinsi Sulawesi Barat**

LOKASI / KEWENANGAN / PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>TP KAB./KOTA</b>	<b>4,244,992</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>2,250,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MAMUJU UTARA (TP Kab/Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAMUJU (TP Kab/Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR (TP Kab/Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>644,992</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MAMUJU UTARA (TP Kab/Kota 06)</b>	<b>644,992</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	50,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	500,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	94,992
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,350,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. POLAWELI MANDAR (TP Kab/Kota 04)</b>	<b>550,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	83,250
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	337,512
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	129,238
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAMUJU (TP Kab/Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	66,492
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	594,488
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	139,020



Provinsi Sulawesi Selatan

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>	<b>126,110,264</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>14,962,386</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>	<b>350,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN (Dekon 01)</b>	<b>350,000</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	350,000
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>770,062</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN (Dekon 05)</b>	<b>770,062</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	260,000
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	112,100
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	84,100
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	140,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	85,650
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	88,212
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>2,240,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN (Dekon 07)</b>	<b>2,240,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	300,000
Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	500,000
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	200,000
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	400,000
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	375,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	465,000
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>2,365,166</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN (Dekon 03)</b>	<b>2,365,166</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	122,108
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	227,500
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	548,208
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	384,050
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	908,300
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	175,000
<b>Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>	<b>269,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN (Dekon 13)</b>	<b>269,000</b>
Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	226,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	43,000
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>1,975,880</b>
<b>SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN (Dekon 12)</b>	<b>1,975,880</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1,975,880
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>2,391,203</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN (Dekon 06)</b>	<b>2,391,203</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	350,825
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	753,722
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	319,276
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	430,650
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan	143,600
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	393,130
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>4,601,075</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN (Dekon 04)</b>	<b>4,601,075</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	735,600
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	881,335
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	179,750
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	844,430
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	1,267,830
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	692,130
<b>TP PROVINSI</b>	<b>2,690,865</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>234,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN (TP Provinsi 03)</b>	<b>234,000</b>
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	234,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,032,940</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN (TP Provinsi 06)</b>	<b>1,032,940</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	400,000
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	300,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	300,000

**Provinsi Sulawesi Selatan**

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	32,940
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,423,925</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN (TP Provinsi 04)</b>	<b>1,423,925</b>
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	456,425
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	967,500
<b>TP KAB./KOTA</b>	<b>108,457,013</b>
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>23,382,022</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JENEPONTO (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>3,218,940</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	3,218,940
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>3,738,940</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	2,738,940
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	1,000,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PINRANG (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>916,880</b>
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	916,880
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TAKALAR (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>2,291,420</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	2,291,420
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.SELAYAR (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>1,602,500</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	602,500
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	1,000,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PARE-PARE (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>5,277,332</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	5,277,332
<b>DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN KOTA MAKASSAR (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>6,336,010</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	6,336,010
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>77,750,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BULUKUMBA (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>30,000,000</b>
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	30,000,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PINRANG (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>5,000,000</b>
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	5,000,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TAKALAR (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>5,000,000</b>
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	5,000,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.MAROS (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>10,000,000</b>
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	10,000,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARRU (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>3,250,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2,500,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>2,500,000</b>
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2,500,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SIDRAP (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>5,500,000</b>
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	500,000
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	5,000,000
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BANTAENG (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>15,000,000</b>
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	15,000,000
<b>DINAS PERTANIAN DAN KELAUTAN KABUPATEN LUWU UTARA (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>2,524,991</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.SELAYAR (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>738,929</b>
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	650,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	88,929
<b>DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN KAB. GOWA (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>495,354</b>
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	400,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	95,354
<b>DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TORAJA UTARA (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>695,354</b>
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	600,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	95,354
<b>DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. SOPPENG (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>595,354</b>
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	500,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	95,354

**Provinsi Sulawesi Selatan**

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>4,800,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BONE (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>550,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	66,700
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	344,348
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	138,952
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JENEPONTO (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>550,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	64,010
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	361,060
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	124,930
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>1,000,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	92,214
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	756,046
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	151,740
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PINRANG (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	48,895
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	44,548
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	571,351
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	135,206
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TAKALAR (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>550,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	86,040
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	358,320
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	105,640
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. WAJO (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>550,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	73,750
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	325,380
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	150,870
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.MAROS (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	38,820
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	82,528
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	543,652
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	135,000

Provinsi Sulawesi Tengah

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>66,208,971</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>8,769,019</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>	<b>250,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH (Dekon 01)</b>	<b>250,000</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	250,000
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>613,240</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH (Dekon 05)</b>	<b>613,240</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	270,000
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	73,600
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	60,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	118,080
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	91,560
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,812,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH (Dekon 07)</b>	<b>1,812,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	137,000
Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	500,000
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	297,000
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	192,250
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	293,500
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	392,250
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>1,942,817</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH (Dekon 03)</b>	<b>1,942,817</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	83,006
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	220,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	483,643
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	274,050
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	707,118
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	175,000
<b>Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>	<b>170,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH (Dekon 13)</b>	<b>170,000</b>
Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	124,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	46,000
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>877,470</b>
<b>BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH (Dekon 12)</b>	<b>877,470</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	877,470
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,397,302</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH (Dekon 06)</b>	<b>1,397,302</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	204,000
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	368,260
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	216,912
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	250,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	358,130
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,706,190</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH (Dekon 04)</b>	<b>1,706,190</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	243,530
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	146,760
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	161,385
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	412,965
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	231,800
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	509,750
<b>TP PROVINSI</b>	<b>46,739,830</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>44,734,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH (TP Provinsi 03)</b>	<b>44,734,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	19,487,920
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	234,000
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	25,012,080
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	438,020
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH (TP Provinsi 06)</b>	<b>438,020</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	400,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	38,020
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,567,810

Provinsi Sulawesi Tengah

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH (TP Provinsi 04)</b>	<b>1,567,810</b>
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	101,810
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	1,466,000
<b>TP KAB./KOTA</b>	<b>10,700,122</b>
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,683,650</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>929,480</b>
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	929,480
<b>DINAS PERTANIAN KEHUTANAN DAN KELAUTAN KOTA PALU (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>754,170</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	754,170
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>2,250,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BANGGAI (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TOJO UNA-UNA (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TOLI-TOLI (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>4,316,472</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BANGGAI (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>602,498</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	500,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	102,498
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BANGGAI KEPULAUAN (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>1,508,978</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	1,400,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	108,978
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. POSO (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>602,498</b>
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	500,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	102,498
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TOLI-TOLI (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>900,000</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	796,732
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	103,268
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DONGGALA (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>702,498</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	100,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	500,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	102,498
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>2,450,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. DONGGALA (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>550,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	79,640
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	327,633
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	142,727
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PARIGI MOUTONG (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>550,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	69,275
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	327,635
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	153,090
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TOJO UNA UNA (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>550,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	58,543
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	357,345
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	134,112
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MOROWALI (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengawasan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya	49,440
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	107,543
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	472,517
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	170,500

Provinsi Sulawesi Tenggara

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Sulawesi Tenggara</b>	<b>39,974,064</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>9,539,281</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>	<b>300,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA (Dekon 01)</b>	<b>300,000</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	300,000
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>654,674</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA (Dekon 05)</b>	<b>654,674</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	255,000
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	56,050
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	84,100
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	100,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	84,280
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	75,244
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,897,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA (Dekon 07)</b>	<b>1,897,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	200,000
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	547,000
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	400,000
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	285,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	465,000
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>2,010,995</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA (Dekon 03)</b>	<b>2,010,995</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	137,200
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan	240,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	471,543
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	270,000
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	717,252
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	175,000
<b>Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>	<b>178,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA (Dekon 13)</b>	<b>178,000</b>
Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	133,900
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	44,100
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>981,470</b>
<b>BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA (Dekon 12)</b>	<b>981,470</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	981,470
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,676,217</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA (Dekon 06)</b>	<b>1,676,217</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	297,450
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	380,063
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	294,924
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	345,650
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	358,130
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,840,925</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA (Dekon 04)</b>	<b>1,840,925</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	489,805
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	174,625
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	233,900
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	380,670
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	288,125
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	273,800
<b>TP PROVINSI</b>	<b>14,002,015</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>12,234,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA (TP Provinsi 03)</b>	<b>12,234,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan	12,000,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	234,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>492,940</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA (TP Provinsi 06)</b>	<b>492,940</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	150,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	300,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	42,940

**Provinsi Sulawesi Tenggara**

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,275,075</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA (TP Provinsi 04)</b>	<b>1,275,075</b>
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	597,293
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	508,062
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	169,720
<b>TP KAB./KOTA</b>	<b>16,432,768</b>
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>2,920,480</b>
<b>DINAS KELAUTAN &amp; PERIKANAN KAB.BUTON (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>1,000,000</b>
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	1,000,000
<b>DINAS KELAUTAN &amp; PERIKANAN KAB.WAKATOBİ (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>1,000,000</b>
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	1,000,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BAU-BAU (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>920,480</b>
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	920,480
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>5,750,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KONAWE SELATAN (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>1,500,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	1,500,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KONAWE UTARA (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>1,500,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	1,500,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MUNA (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>2,750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2,000,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>4,812,288</b>
<b>DINAS KELAUTAN &amp; PERIKANAN KAB.BUTON (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>2,897,142</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	2,200,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	600,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	97,142
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MUNA (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>1,915,146</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	1,800,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	115,146
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>2,950,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BOMBANA (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>550,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	70,800
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	302,920
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	176,280
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KOLAKA (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	68,365
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	567,573
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	164,062
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KONAWE SELATAN (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	54,900
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	624,760
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	120,340
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MUNA (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	54,900
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	624,760
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	120,340



**Provinsi Sulawesi Utara**

LOKASI / KEWENANGAN / PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Sulawesi Utara</b>	<b>28,972,602</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>10,494,435</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>	<b>350,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA (Dekon 01)</b>	<b>350,000</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	350,000
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>667,820</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA (Dekon 05)</b>	<b>667,820</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	300,000
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	84,100
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	120,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	85,400
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	78,320
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,715,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA (Dekon 07)</b>	<b>1,715,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	200,000
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	400,000
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	200,000
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	250,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	665,000
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>1,922,553</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA (Dekon 03)</b>	<b>1,922,553</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	137,200
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	220,500
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	444,503
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	279,050
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	666,300
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	175,000
<b>Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>	<b>277,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA (Dekon 13)</b>	<b>277,000</b>
Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	222,200
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	54,800
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>1,085,370</b>
<b>BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROPINSI SULAWESI UTARA (Dekon 12)</b>	<b>1,085,370</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1,085,370
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,534,692</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA (Dekon 06)</b>	<b>1,534,692</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	202,160
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	480,644
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	230,638
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	190,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan	88,900
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	342,350
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>2,942,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA (Dekon 04)</b>	<b>2,942,000</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	100,430
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	1,493,470
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	190,630
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	347,950
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	369,670
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	439,850
<b>TP PROVINSI</b>	<b>5,642,636</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>1,234,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA (TP Provinsi 03)</b>	<b>1,234,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	1,000,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	234,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>4,408,636</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA (TP Provinsi 06)</b>	<b>4,408,636</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	2,750,000
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	1,100,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	500,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	58,636

**Provinsi Sulawesi Utara**

LOKASI / KEWENANGAN / PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>TP KAB./KOTA</b>	<b>12,835,531</b>
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>6,362,810</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BITUNG (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>6,362,810</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	6,362,810
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>2,250,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB SANGIHE (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MINAHASA TENGGARA (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. MINAHASA (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>3,022,721</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB SANGIHE (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>1,806,043</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	1,700,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	106,043
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>611,227</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	500,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	111,227
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MINAHASA TENGGARA (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>605,451</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	500,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	105,451
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,200,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MINAHASA TENGGARA (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>650,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	77,610
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	435,600
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	136,790
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MINAHASA UTARA (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>550,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	108,082
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	283,120
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	158,798

Provinsi Gorontalo

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>53,072,915</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>7,261,936</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>	<b>250,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO (Dekon 01)</b>	<b>250,000</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	250,000
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>712,230</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO (Dekon 05)</b>	<b>712,230</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	270,000
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	56,050
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	73,600
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	100,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	123,950
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	88,630
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,365,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO (Dekon 07)</b>	<b>1,365,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	100,000
Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	400,000
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	300,000
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	100,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	465,000
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>1,678,962</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO (Dekon 03)</b>	<b>1,678,962</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	96,056
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	235,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	383,886
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	190,000
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	574,020
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	200,000
<b>Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>	<b>151,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO (Dekon 13)</b>	<b>151,000</b>
Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	99,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	52,000
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>640,580</b>
<b>SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI GORONTALO (Dekon 12)</b>	<b>640,580</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	640,580
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,413,961</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO (Dekon 06)</b>	<b>1,413,961</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	214,800
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	347,245
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	235,876
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	266,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	350,040
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,050,203</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO (Dekon 04)</b>	<b>1,050,203</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	96,163
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	55,400
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	36,200
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	319,850
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	195,400
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	347,190
<b>TP PROVINSI</b>	<b>27,408,797</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>25,468,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO (TP Provinsi 03)</b>	<b>25,468,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	21,000,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	468,000
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	4,000,000
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,940,797</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO (TP Provinsi 04)</b>	<b>1,940,797</b>
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	559,797
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	1,381,000

**Provinsi Gorontalo**

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>TP KAB./KOTA</b>	<b>18,402,182</b>
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>5,668,438</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. GORONTALO UTARA (TP Kab/Kota 07)</b>	<b>5,668,438</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	5,668,438
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>8,750,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BONE BOLANGO (TP Kab/Kota 03)</b>	<b>8,000,000</b>
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	8,000,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. POHUWATO (TP Kab/Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>2,383,744</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BOALEMO (TP Kab/Kota 06)</b>	<b>591,872</b>
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	500,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	91,872
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. GORONTALO UTARA (TP Kab/Kota 06)</b>	<b>1,791,872</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	1,500,000
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	200,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	91,872
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,600,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. GORONTALO UTARA (TP Kab/Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	66,628
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	569,005
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	164,367
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. POHUWATO (TP Kab/Kota 04)</b>	<b>800,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	66,180
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	580,280
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	153,540

Provinsi Maluku

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Maluku</b>	<b>39,139,658</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>10,309,321</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>	<b>300,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU (Dekon 01)</b>	<b>300,000</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	300,000
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>692,554</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU (Dekon 05)</b>	<b>692,554</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	290,000
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	84,100
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	60,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	176,200
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	82,254
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,272,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU (Dekon 07)</b>	<b>1,272,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	137,000
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	147,000
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	378,000
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	194,080
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	415,920
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>1,794,656</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU (Dekon 03)</b>	<b>1,794,656</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	113,190
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan	270,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	522,366
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	234,050
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	480,050
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	175,000
<b>Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>	<b>404,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU (Dekon 13)</b>	<b>404,000</b>
Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	312,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	92,000
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>929,660</b>
<b>BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI MALUKU (Dekon 12)</b>	<b>929,660</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	929,660
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,960,481</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU (Dekon 06)</b>	<b>1,960,481</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	293,600
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	504,475
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	415,816
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	285,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan	85,800
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	375,790
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>2,955,970</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU (Dekon 04)</b>	<b>2,955,970</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	398,020
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	427,595
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	207,880
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	827,510
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	697,105
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	397,860
<b>TP PROVINSI</b>	<b>3,193,970</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>1,234,000</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU (TP Provinsi 03)</b>	<b>1,234,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan	1,000,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	234,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>242,940</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU (TP Provinsi 06)</b>	<b>242,940</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	100,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	100,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	42,940

Provinsi Maluku

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,717,030</b>
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU (TP Provinsi 04)</b>	<b>1,717,030</b>
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	814,500
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	801,250
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	101,280
<b>TP KAB./KOTA</b>	<b>25,636,367</b>
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>12,406,876</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MALUKU TENGGARA (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>5,760,738</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	5,760,738
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SERAM BAGIAN BARAT (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>947,600</b>
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	947,600
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA AMBON (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>5,698,538</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	5,698,538
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>3,000,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB MALUKU TENGGARA BARAT (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MALUKU TENGAH (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MALUKU TENGGARA (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SERAM BAGIAN BARAT (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>9,529,491</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB MALUKU TENGGARA BARAT (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>2,550,643</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	2,400,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	150,643
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KEPULAUAN ARU (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>1,649,903</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	1,505,620
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	144,283
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SERAM BAGIAN BARAT (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>1,026,831</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	900,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	126,831
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SERAM BAGIAN TIMUR (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>2,548,663</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	2,405,730
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	142,933
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BURU (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>750,643</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	600,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	150,643
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA AMBON (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>1,002,808</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	900,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	102,808
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>700,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SERAM BAGIAN BARAT (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>700,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	74,425
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	463,335
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	162,240

Provinsi Maluku Utara

LOKASI / KEWENANGAN / PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Maluku Utara</b>	<b>54,407,770</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>8,122,596</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>	<b>264,950</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA (Dekon 01)</b>	<b>264,950</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	264,950
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>723,286</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA (Dekon 05)</b>	<b>723,286</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	280,000
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	82,650
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	84,100
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	60,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	132,840
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	83,696
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,382,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA (Dekon 07)</b>	<b>1,382,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	204,000
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	147,000
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	369,500
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	222,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	439,500
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>1,833,267</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA (Dekon 03)</b>	<b>1,833,267</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	132,700
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	270,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	387,527
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	265,000
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	578,040
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	200,000
<b>Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>	<b>187,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA (Dekon 13)</b>	<b>187,000</b>
Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	129,600
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	57,400
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>1,024,740</b>
<b>BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI MALUKU UTARA (Dekon 12)</b>	<b>1,024,740</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1,024,740
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,498,353</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA (Dekon 06)</b>	<b>1,498,353</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	225,900
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	385,819
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	305,194
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	200,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	381,440
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,209,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA (Dekon 07)</b>	<b>1,382,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	204,000
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	147,000
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	369,500
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	222,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	439,500
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>1,833,267</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA (Dekon 03)</b>	<b>1,833,267</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	132,700
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	270,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	387,527
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	265,000
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	578,040
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	200,000
<b>Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>	<b>187,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA (Dekon 13)</b>	<b>187,000</b>
Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	129,600
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	57,400

Provinsi Maluku Utara

LOKASI / KEWENANGAN / PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>1,024,740</b>
<b>BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI MALUKU UTARA (Dekon 12)</b>	<b>1,024,740</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1,024,740
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,498,353</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA (Dekon 06)</b>	<b>1,498,353</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	225,900
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	385,819
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	305,194
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	200,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	381,440
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,209,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA (Dekon 04)</b>	<b>1,209,000</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	114,885
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	129,275
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	96,850
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	365,065
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	205,820
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	297,105
<b>TP PROVINSI</b>	<b>25,705,100</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>20,234,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA (TP Provinsi 03)</b>	<b>20,234,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	15,000,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	234,000
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	5,000,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>4,216,100</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA (TP Provinsi 06)</b>	<b>4,216,100</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	3,950,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	200,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	66,100
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,255,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA (TP Provinsi 04)</b>	<b>1,255,000</b>
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	855,000
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	400,000
<b>TP KAB./KOTA</b>	<b>20,580,074</b>
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>5,319,232</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA TERNATE (TP Kab/Kota 07)</b>	<b>5,319,232</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	5,319,232
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>4,250,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HALMAHERA SELATAN (TP Kab/Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA .TIDORE, MALUKU UTARA (TP Kab/Kota 03)</b>	<b>1,500,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	1,500,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA TERNATE (TP Kab/Kota 03)</b>	<b>2,000,000</b>
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2,000,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>8,910,842</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PEKANAN KAB. HALMAHERA BARAT (TP Kab/Kota 06)</b>	<b>1,510,140</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	1,400,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	110,140
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HALMAHERA SELATAN (TP Kab/Kota 06)</b>	<b>735,814</b>
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	600,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	135,814
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KEPULAUAN SULA (TP Kab/Kota 06)</b>	<b>2,513,490</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	2,400,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	113,490
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PULAU MOROTAI (TP Kab/Kota 06)</b>	<b>2,582,614</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	2,440,320
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	142,294
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA TIDORE KEPULAUAN (TP Kab/Kota 06)</b>	<b>1,568,784</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	1,450,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	118,784



Provinsi Maluku Utara

LOKASI / KEWENANGAN / PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>2,100,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HALMAHERA SELATAN (TP Kab/Kota 04)</b>	<b>700,000</b>
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	592,100
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	107,900
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KEP. SULA (TP Kab/Kota 04)</b>	<b>700,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	51,650
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	500,600
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	147,750
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PULAU MOROTAI (TP Kab/Kota 04)</b>	<b>700,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	98,200
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	400,620
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	201,180



Provinsi Papua

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Papua</b>	<b>60,545,683</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>10,336,499</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>	<b>300,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA (Dekon 01)</b>	<b>300,000</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	300,000
<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>862,991</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA (Dekon 05)</b>	<b>862,991</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	411,490
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	56,050
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	84,100
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	87,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	100,960
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	123,391
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,065,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA (Dekon 07)</b>	<b>1,065,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	150,000
Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200,000
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	350,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	365,000
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>2,103,817</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA (Dekon 03)</b>	<b>2,103,817</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	128,282
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	320,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	477,110
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	376,100
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	602,325
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	200,000
<b>Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>	<b>269,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA (Dekon 13)</b>	<b>269,000</b>
Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	199,880
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	69,120
<b>Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>	<b>1,166,955</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA (Dekon 12)</b>	<b>1,166,955</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1,166,955
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>1,463,236</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA (Dekon 06)</b>	<b>1,463,236</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	212,005
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	359,169
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	275,932
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	223,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	393,130
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>3,105,500</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA (Dekon 04)</b>	<b>3,105,500</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	237,517
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	439,516
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	206,142
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	495,133
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	1,092,105
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	635,087
<b>TP PROVINSI</b>	<b>3,016,720</b>
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>234,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA (TP Provinsi 03)</b>	<b>234,000</b>
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	234,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>648,220</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA (TP Provinsi 06)</b>	<b>648,220</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	200,000
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	200,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	200,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	48,220

Provinsi Papua

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>2,134,500</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA (TP Provinsi 04)</b>	<b>2,134,500</b>
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	784,500
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	1,350,000
<b>TP KAB./KOTA</b>	<b>47,192,464</b>
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>12,181,970</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MERAUKE (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>5,771,738</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	5,771,738
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. YAPEN (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>5,410,232</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	5,410,232
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIAK (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>1,000,000</b>
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	1,000,000
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>24,250,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JAYAPURA (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>1,500,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	1,500,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MAPPI (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>2,750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2,000,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MERAUKE (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>20,000,000</b>
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	20,000,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>9,160,494</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MAPPI (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>1,775,000</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	1,600,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	175,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KEP. YAPEN (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>868,894</b>
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	700,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	168,894
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MERAUKE (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>1,168,873</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	350,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	650,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	168,873
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MIMIKA (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>2,675,254</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	2,500,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	175,254
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. NABIRE (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>2,672,473</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	2,500,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	172,473
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,600,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BIAK NUMFORT (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>750,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	114,370
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	480,578
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	155,052
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA JAYAPURA (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>850,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	93,160
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	546,250
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	210,590

Provinsi Papua Barat

LOKASI / KEWENANGAN /PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>Provinsi Papua Barat</b>	<b>71,488,241</b>
<b>DEKONSENTRASI</b>	<b>10,688,071</b>
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	480,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT (Dekon 01)</b>	<b>480,000</b>
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	480,000
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	800,280
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT (Dekon 05)</b>	<b>800,280</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	400,000
Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	84,100
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	80,000
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	144,960
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	91,220
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1,575,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT (Dekon 07)</b>	<b>1,575,000</b>
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	150,000
Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200,000
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	150,000
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	200,000
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	360,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	515,000
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	2,290,957
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT (Dekon 03)</b>	<b>2,290,957</b>
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	125,818
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	370,000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	513,521
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	468,100
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	613,518
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	200,000
<b>Perikanan</b>	<b>247,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT (Dekon 13)</b>	<b>247,000</b>
Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	195,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	52,000
Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	841,280
<b>BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI PAPUA BARAT (Dekon 12)</b>	<b>841,280</b>
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	841,280
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	1,703,554
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT (Dekon 06)</b>	<b>1,703,554</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	210,550
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	482,820
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	452,054
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	200,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	358,130
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2,750,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT (Dekon 04)</b>	<b>2,750,000</b>
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	240,510
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	725,625
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	153,400
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	572,005
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	551,100
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	507,360
<b>TP PROVINSI</b>	<b>22,722,020</b>
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	20,000,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT (TP Provinsi 03)</b>	<b>20,000,000</b>
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	20,000,000
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	288,020
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT (TP Provinsi 06)</b>	<b>288,020</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	100,000
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	150,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	38,020
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2,434,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT (TP Provinsi 04)</b>	<b>2,434,000</b>
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	684,000
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	1,750,000

**Provinsi Papua Barat**

LOKASI / KEWENANGAN / PROGRAM/SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (000)
<b>TP KAB./KOTA</b>	<b>38,078,150</b>
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1,961,140</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB TELUK WONDAMA (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>961,140</b>
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	961,140
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN RAJA AMPAT (TP Kab./Kota 07)</b>	<b>1,000,000</b>
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	1,000,000
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>31,750,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SORONG (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>3,000,000</b>
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	3,000,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. FAK-FAK (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>25,750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	25,000,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KAIMANA (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>1,500,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	1,500,000
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MANOKWARI (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN RAJA AMPAT (TP Kab./Kota 03)</b>	<b>750,000</b>
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	750,000
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>2,767,010</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.KAIMANA (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>840,745</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	700,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	140,745
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN RAJA AMPAT (TP Kab./Kota 06)</b>	<b>1,926,265</b>
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	1,750,000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	176,265
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1,600,000</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. RAJA AMPAT (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>750,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	79,166
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	410,554
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	260,280
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SORONG (TP Kab./Kota 04)</b>	<b>850,000</b>
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	93,440
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	620,400
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	136,160

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



*[Signature]*  
Hanung Cahyono

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO